

**KAJIAN HISTORIS IMPLEMENTASI
NOUMÉA ACCORD 1998 DI KALÉDONIA BARU**

SKRIPSI

**OLEH:
ALAWIYAH
NIM 165110307111008**



**PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA PRANCIS
JURUSAN BAHASA DAN SASTRA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2019**

**KAJIAN HISTORIS IMPLEMENTASI NOUMÉA ACCORD 1998 DI
KALEDONIA BARU**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Brawijaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar *Sarjana Sastra***



**OLEH:
ALAWIYAH
165110307111008**

**PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA PRANCIS
JURUSAN BAHASA DAN SASTRA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :
Nama : Alawiyah
NIM : 165110307111008
Program Studi : Bahasa dan Sastra Prancis

Menyatakan Bahwa :

1. Skripsi ini adalah benar-benar karya saya, bukan merupakan jiplakan dari karya orang lain, dan belum pernah digunakan sebagai syarat mendapatkan gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi manapun.
2. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini merupakan jiplakan, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang akan diberikan

Malang, 20 Desember 2019



Alawiyah
NIM 165110307111008

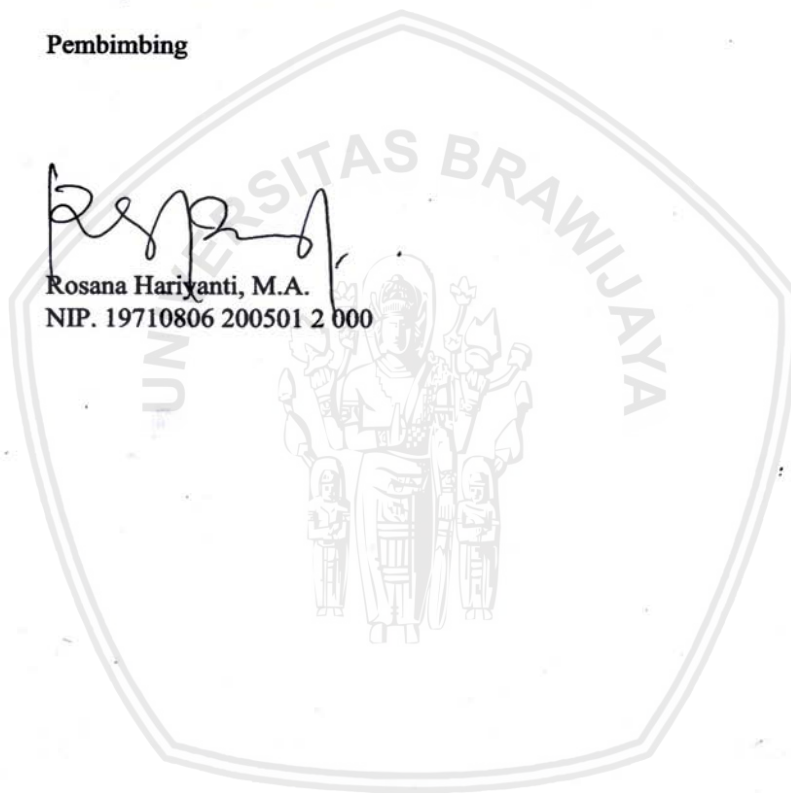
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Sarjana atas nama Alawiyah telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.

Malang, 20 Desember 2019

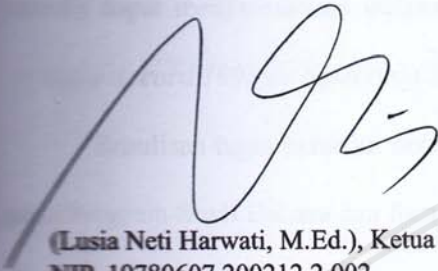
Pembimbing



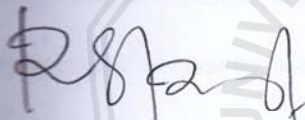
Rosana Hariyanti, M.A.
NIP. 19710806 200501 2 000



Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Sarjana atas nama Alawiyah telah disetujui oleh Dewan Penguji sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana.



(Lusiana Neti Harwati, M.Ed.), Ketua Dewan Penguji
NIP. 19780607 200212 2 002



(Rosana Hariyanti, M.A.), Anggota Dewan Penguji
NIP. 19710806 200501 2 000

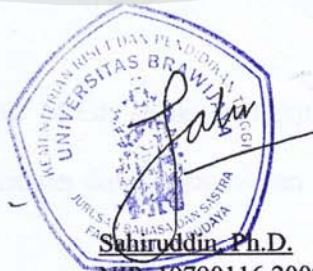
Mengetahui,

Ketua Program Studi
Bahasa dan Sastra Prancis

Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra



Rosana Hariyanti, M.A.
NIP. 19710806 200501 2 000



Sahruddin, Ph.D.
NIP. 19790116 200912 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *Kajian Historis Implementasi Nouméa Accord 1998 di Kaledonia Baru* dengan baik.

Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memperoleh gelar *Sarjana Sastra* pada Program Studi Bahasa dan Sastra Prancis, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Rasyid (Alm.) dan Ibu Sahriyah, serta kedua saudara penulis, Mohamad Rizal dan Suryani yang selalu mendoakan dan senantiasa memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
2. Madame Rosana Hariyanti, M.A. selaku Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Prancis sekaligus pembimbing yang telah sabar membantu, memberi arahan dan saran-saran yang membangun dalam penyusunan skripsi penulis dari awal hingga akhir.
3. Madame Lusiana Neti Harwati, M.Ed. selaku penguji yang telah sabar memberi arahan dalam penyusunan skripsi penulis dan memberikan saran-saran yang membangun.
4. Madame Siti Khusnul Khotimah, M.A. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu dan mengarahkan penulis dari awal hingga akhir semester masa studi.

5. Mesdames dan Messieurs Program Studi Bahasa dan Sastra Prancis yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat kepada penulis.
6. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Bahasa dan Sastra Prancis, khususnya Angkatan 2016.
7. Sahabat-sahabat penulis, khususnya Aldino, Mellisa, Gita, Sidra, Afifah, Dinta, Fransco, Gilang Rizky, Gilang Seiler, Gaza, Rosa, Wita, Farhan, Ka Aul, Dhea, Dayeh, Ken, Dinda, dan Ica yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan dan semangat kepada penulis.
8. Teman-teman di AIESEC Universitas Brawijaya yang membantu penulis berkembang menjadi pribadi yang lebih baik serta teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari segi penulisan skripsi. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca.

Malang, 20 Desember 2019

Alawiyah

ABSTRAK

Alawiyah. 2019. **Kajian Historis Implementasi Nouméa Accord 1998 di Kaledonia Baru**. Program Studi Bahasa dan Sastra Prancis, Jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya.

Pembimbing : Rosana Hariyanti, M.A.

Kata Kunci : Implementasi, Kanak, *Nouméa Accord*, Referendum, *Gendarmerie*

Konflik antara penduduk pro-kemerdekaan etnis pribumi Kanak dan pro-loyalis Prancis di Kaledonia Baru berlangsung sejak diresmikannya Kaledonia Baru menjadi Wilayah Seberang Laut Prancis (*Territoire de l’Outre-mer*) hingga pada puncaknya di tahun 1984-1988 yang ditandai dengan peristiwa “*les événements*”. Perjanjian Matignon-Oudinot Accords (1988) diterbitkan untuk meredam konflik tersebut, namun ketidakpuasan akan implementasinya kemudian menuju pada kesepakatan baru yakni *Nouméa Accord*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi implementasi *Nouméa Accord* 1998 di Kaledonia Baru serta dampak perjanjian tersebut di bidang politik, sosial budaya dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan teori multikausalitas dan deskriptif kausalitas oleh Kuntowijoyo tahun 2008. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor politik, sosial budaya dan ekonomi menjadi faktor yang melatarbelakangi implementasi *Nouméa Accord* di Kaledonia Baru. Dampak dari *Nouméa Accord* dalam bidang politik adalah adanya transfer kekuasaan dari Prancis ke Kaledonia Baru di sektor tertentu, batasan pemilih dalam referendum kemerdekaan dan pelaksanaan referendum kemerdekaan di tahun 2018. Selain itu, dampak di bidang sosial budaya adalah kebijakan imigrasi oleh pemerintah Prancis, pengakuan identitas Kanak dan program pemerintah untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia di Kaledonia Baru. Adapun dampak di bidang ekonomi adalah aturan mata uang yang berlaku di Kaledonia Baru, kebijakan industri pertambangan dan sistem pembagian hasil pertambangan.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hasil referendum kemerdekaan 2018 yang menetapkan Kaledonia Baru tetap menjadi bagian dari Prancis, saran bagi peneliti selanjutnya adalah meneliti faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat pro-loyalis untuk mendukung Kaledonia Baru agar tetap menjadi bagian dari Prancis dan peran partai pro-loyalis dalam memenangkan suara di referendum kemerdekaan Kaledonia Baru 2018.

EXTRAIT

Alawiyah. 2019. **L'étude historique de l'application de l'Accord de Nouméa de 1998 en Nouvelle-Calédonie**. La Section de Langue et Littérature Françaises, Le Département de Langue et Littérature, La Faculté des Sciences Culturelles, L'Université Brawijaya.

Superviseur: Rosana Hariyanti, M.A.

Mots-clés: Mise en œuvre, Kanak, Accord de Nouméa, Référendum, Gendarmerie.

Le conflit social entre indépendantistes et loyalistes en Nouvelle-Calédonie a lieu depuis la pramulgation de la Nouvelle-Calédonie devenant une partie des territoires français d'outre-mer (Territoire de l'Outre-mer) à son apogée en 1984-1988 marquée par "les événements". L'Accord de Matignon-Oudinot (1988) a été promulgué pour réduire le conflit, mais l'insatisfaction à l'égard de sa mise en œuvre a conduit à un nouvel accord, l'Accord de Nouméa.

Le but de cette étude est de déterminer les principaux facteurs de l'application de l'Accord de Nouméa de 1998 en Nouvelle-Calédonie et les impacts de l'accord sur les domaines politique, socio-culturel et économique. Cette étude utilise la théorie de la multi-causalité et la théorie de la causalité-descriptive par Kuntowijoyo en 2008. Cette étude est une recherche descriptive-qualitative.

Les résultats de cette étude montrent que les facteurs politiques, socio-culturels et économiques sont les principaux facteurs de l'application de l'Accord de Nouméa en Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, les impacts de l'Accord de Nouméa sur le secteur politique sont le transfert de pouvoir de la France à la Nouvelle-Calédonie dans certains secteurs, les restrictions électorales au référendum sur l'indépendance et le référendum sur l'indépendance en 2018. De plus, les impacts sur le secteur socio-culturel sont la politique d'immigration par le gouvernement français, reconnaissance de l'identité Kanak et programmes gouvernementaux pour développer les ressources humaines potentielles en Nouvelle-Calédonie. Enfin, l'impact sur l'économie sont l'application de la monnaie en Nouvelle-Calédonie, la politique de l'industrie minière et le système de distribution des produits miniers.

Pour en savoir plus sur les résultats du référendum sur l'indépendance en 2018, les suggestions pour les chercheurs sont de déterminer les principaux facteurs des loyalistes qui soutient la Nouvelle-Calédonie reste française et le rôle du parti loyaliste qui a remporté le vote lors du référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie en 2018.

DAFTAR ISI

SAMPUL BAGIAN DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
EXTRAIT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.6 Definisi Istilah Kunci.....	6
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Teori Multikausalitas.....	7
2.1.2 Teori Deskriptif Kausalitas.....	7



2.2 Penelitian Terdahulu 8

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian 11

3.2 Sumber Data 12

3.3 Teknik Pengumpulan Data 13

3.4 Analisis Data 13

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Implementasi Nouméa Accord 1998
di Kaledonia Baru 15

4.1.1 Faktor Politik..... 16

4.1.2 Faktor Sosial Budaya 19

4.1.3 Faktor Ekonomi..... 25

4.2 Dampak Nouméa Accord 1998 di Kaledonia Baru 27

4.2.1 Dampak di Bidang Politik..... 28

4.2.2 Dampak di Bidang Sosial Budaya..... 36

4.2.3 Dampak di Bidang Ekonomi..... 43

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 46

5.2 Saran 48

DAFTAR PUSTAKA 49

CATATAN..... 51

LAMPIRAN.....55



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Nouméa Accord 1998.....	55
LAMPIRAN 2	<i>Curriculum Vitae</i>	72
LAMPIRAN 3	Berita Acara Bimbingan Skripsi.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kaledonia Baru resmi menjadi *Territoire de l'Outre-mer* (TOM) atau Wilayah Seberang Laut Prancis pada tahun 1946, namun setelahnya terjadi konflik antara warga pro-loyalis Prancis *vis-a-vis* gerakan pro-kemerdekaan etnis pribumi Kanak. Pada tahun 1960, gerakan pro-kemerdekaan dengan tokohnya Jean-Marie Tjibaou menuntut kemerdekaan Kanak dan melakukan perlawanan kepada majelis wilayah, yang berujung pada deklarasi pembentukan pemerintahan etnis Kanak di Provinsi Utara pada tahun 1967. Perdebatan mengenai langkah untuk menempuh kemerdekaan terus berlangsung hingga berdirinya *Front indépendantiste* di tahun 1979 yang berubah menjadi *Front de libération nationale kanak et socialiste* (FLNKS) pada tahun 1984.

Sebuah pertemuan perwakilan dari berbagai gerakan politik yang dibuka di hadapan Sekretaris Negara untuk DOM-TOM menghasilkan deklarasi meja bundar Nainville-le-Roches yang diterbitkan pada tanggal 12 Juli 1983. Deklarasi tersebut menyimpulkan perlunya undang-undang otonomi transisional dan khusus. Namun, hasil deklarasi tersebut ditolak oleh perwakilan partai *Le Rassemblement* (RPCR), Jacques Lafleur. Dalam penerapan deklarasi *Nainville-les-Roches*, hukum 6 September 1984 (Undang-Undang Lemoine) memberi Kaledonia Baru status otonomi yang luas, yang juga akan menjadi hukum yang tersingkat. Implementasi hukum tersebut tidak berjalan dengan baik seiring dengan konflik antara separatis dan aktivis anti-kemerdekaan yang berujung pada diumumkannya keadaan darurat

dan pengadaan jam malam di Kaledonia Baru pada 12 Januari 1985. Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 1985 ditetapkan undang-undang sementara yang mengatur prinsip konsultasi yang berupa musyawarah antara Prancis dan majelis wilayah mengenai masa depan wilayah tersebut sebelum 31 Desember 1987 dan pembentukan dewan eksekutif bersama Komisaris Tinggi, kongres dan empat majelis wilayah; Jean-Marie Tjibaou selaku presiden wilayah Utara, Léopold Jorédié dari wilayah Pusat, Yeiwéné Yeiwéné dari wilayah Kepulauan dan Jean Lèques serta Pierre Frogier (RPCR) dari wilayah Selatan. Dick Ukeiwé (RPCR) bertindak sebagai presiden kongres.

Pada tanggal 20 Maret 1986, Bernard Pons dilantik menjadi Menteri DOM dan pada tanggal 17 Juli 1986, undang-undang baru yang dikenal sebagai "*Pons Statute*" menggantikan undang-undang Fabius-Pisani dan menetapkan status baru untuk Kaledonia Baru, dan juga referendum untuk penentuan nasib sendiri sebelum akhir 1987. Pada bulan Desember 1986, PBB kemudian memasukkan Kaledonia Baru sebagai *non-self governing territories* (1986), yang perlu didekolonisasi sesuai Resolusi SMU PBB 1514 (XV) 15 Desember 1960, dengan tiga opsi: *sovereign state* (negara merdeka berdaulat), *free association* (asosiasi bebas), atau *integration with an independent state* (integrasi dengan negara merdeka).

Pada tahun 1987, *Pons Statute* berupaya membentuk hukum yang bertentangan dengan hukum adat khususnya mengenai hak properti rakyat dan melakukan pengawasan militer terhadap suku-suku di Kaledonia Baru. Menurut para aktivis pro-kemerdekaan, hukum baru tersebut menunjukkan kembalinya perbudakan ekonomi oleh kolonialisme dan penolakan orang Kanak (*Le Monde*, 8

April 1988). Referendum pada tanggal 13 September 1987 gagal untuk menyelesaikan masalah teritorial (Nuttall, 2017, p. 161). Harapan Prancis bahwa hukum tersebut akan menekan aktivis Kanak untuk menuju perdamaian dan rekonsiliasi meleset dan pada realitanya ketegangan mencapai puncaknya pada bulan April-Mei 1988. Pada saat yang sama, jumlah polisi dan *gendarmerie* dilipatgandakan selama kedua putaran pemilihan presiden di Prancis berlangsung. Namun, hal tersebut justru berujung pada aksi penyanderaan 27 *gendarmerie* oleh pemuda gerakan pro-kemerdekaan dan empat orang dibunuh (Leblic, 2018 p.529). Pemerintah Jacques Chirac kemudian memerintahkan penyerangan gua di Ouvéa yang menjadi tempat sandera para *gendarmerie*. Para sandera kemudian dibebaskan namun ada 21 orang yang tewas (19 Kanak dan 2 militer).

Pada tanggal 15 Mei 1988, Perdana Menteri baru, Michel Rocard, merancang sebuah misi yang disebut “misi dialog” yang dipimpin oleh Christian Blanc. Misi tersebut akan mengarah pada penandatanganan Perjanjian Matignon di Paris pada tanggal 26 Juni 1988 oleh RPCR, FLNKS dan Prancis. Perjanjian tersebut meratifikasi pembentukan tiga provinsi (Selatan, Utara dan Kepulauan), yang secara bebas dikelola oleh majelis wilayah. Perjanjian tersebut juga menyediakan periode pembangunan selama sepuluh tahun, dengan jaminan ekonomi dan kelembagaan untuk komunitas Kanak, sebelum warga Kaledonia Baru dapat memutuskan independensi mereka. Perjanjian Matignon diselesaikan pada 20 Agustus 1988 oleh Perjanjian Oudinot yang disetujui oleh dua pihak penandatanganan untuk persiapan perundang-undangan dan penentuan nasib Kaledonia Baru pada tahun 1998. Kedua perjanjian tersebut pada akhirnya dikenal sebagai Perjanjian

Matignon-Oudinot Accords yang memungkinkan pemulihan perdamaian sipil dan memperbaiki kerangka kerja status transisi dari Kaledonia Baru hingga tahun 1998.

Perjanjian Matignon-Oudinot Accords (1988) sempat meredam konflik antara kaum pro-kemerdekaan Kanak dan warga pro-loyalis Prancis, melalui pembangunan ekonomi, amnesti dan rekonsiliasi. Akan tetapi ketidakpuasan terhadap implementasinya kemudian menuju pada kesepakatan baru yakni Nouméa Accord (1998) yang berisi janji pemerintah Prancis untuk memberikan kekuasaan politik kepada Kaledonia Baru, hingga wilayah tersebut dapat memutuskan status mereka melalui referendum di tahun 2018 apakah tetap ingin menjadi bagian dari Prancis atau merdeka. Prancis akan tetap mengendalikan sektor militer, kebijakan luar negeri, imigrasi, kepolisian, dan mata uang di Kaledonia Baru hingga 20 tahun ke depan. Hal tersebut menarik bagi penulis untuk meneliti faktor-faktor yang melatarbelakangi implementasi Nouméa Accord (1998) di Kaledonia Baru serta dampaknya dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti menyusun dua rumusan masalah, yaitu:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi implementasi Nouméa Accord 1998 di Kaledonia Baru ?
2. Bagaimanakah dampak Nouméa Accord 1998 dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya di Kaledonia Baru ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi implementasi Nouméa Accord 1998 di Kaledonia Baru .
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak Nouméa Accord 1998 dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya di Kaledonia Baru.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Sebagai manfaat teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang berminat untuk meneliti sejarah kolonialisme Prancis di Wilayah Seberang Laut Prancis, khususnya Kaledonia Baru. Sebagai manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan khasanah pustaka sejarah sebagai bahan bacaan yang berguna bagi pembelajaran sejarah, khususnya mengenai Wilayah Seberang Laut Prancis.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi tiga aspek, yaitu aspek ruang, aspek waktu, dan aspek tematis. Aspek ruang dalam penelitian ini adalah Kaledonia Baru. Aspek waktu dalam penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya Matignon-Oudinot Accord tahun 1988 hingga referendum kemerdekaan Kaledonia Baru tahun 2018. Sementara itu, aspek tematis dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi implementasi dan dampak Nouméa Accord 1998 di bidang politik, sosial-budaya dan ekonomi di Kaledonia Baru.

1.6 Definisi Istilah Kunci

- a. Implementasi: “Pelaksanaan; penerapan.” (KBBI dalam Jaringan).
- b. Kanak: “Penduduk asli Kaledonia Baru.” (Leblic, 2008, p. 529).
- c. Nouméa Accord: Perjanjian yang berisi janji pemerintah Prancis untuk memberikan kekuasaan politik kepada Kaledonia Baru, hingga wilayah tersebut dapat akses kedaulatan penuh melalui referendum di bulan November tahun 2018. (Diakses dari <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000000555817&categorieLien=id>).
- d. Referendum: “Cara penyerahan sesuatu hal kepada keputusan rakyat untuk secara langsung diterima atau ditolak.” (Kodhi, 1989, hal. 40).
- e. *Gendarmerie*: “Pasukan polisi yang merupakan bagian dari angkatan bersenjata di Prancis dan beberapa negara lain di mana bahasa Prancis digunakan.” (*Cambridge Dictionary Online*).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menguraikan landasan teoretis yang dapat mendukung untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini serta perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Multikausalitas

Menurut Kuntowijoyo (2008, hal. 42), dalam analisis multikausal, sejarawan melihat sebuah kasus dari beberapa sisi, prosesusual, dan struktural yang merupakan kausalitas yang kompleks. Kuntowijoyo (2008) menyebutkan bahwa Kartodirdjo dalam buku *The Peasants' Revolt of Banten in 1888* melakukan analisis kausalitas sejarah yang multikausal dalam berbagai aspek, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kartodirdjo menyimpulkan bahwa pemberontakan petani di Banten tahun 1888 adalah multikausal.

Sejalan dengan hal tersebut, penulis akan menggunakan teori multikausalitas untuk menjawab rumusan masalah pertama yang menitikberatkan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi implementasi Nouméa Accord 1998 di Kaledonia Baru dengan memperhatikan aspek-aspek yang menonjol yaitu aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.

2.1.2 Teori Deskriptif Kausalitas

Kuntowijoyo (2008, hal. 36-37) menyatakan bahwa dalam analisis deskriptif peneliti sejarah dituntut untuk memaparkan kronologi dari sebuah

rangkaian peristiwa, namun dalam analisis deskriptif kausalitas peneliti sejarah juga dituntut untuk dapat memahami apa yang menjadi latar belakang terjadinya suatu peristiwa. Dalam kausalitas, sejarawan harus menganalisis dua hal, yaitu kasus (peristiwa) dan perubahan.

Selanjutnya pada penelitian ini, penulis menggunakan teori deskriptif kausalitas oleh Kuntowijoyo untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu bagaimanakah dampak Nouméa Accord 1998 dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya di Kaledonia Baru. Dalam menjawab rumusan masalah ini, penulis akan menganalisis dampak yang ditimbulkan dari implementasi Nouméa Accord 1998 terhadap aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan dua penelitian terdahulu sebagai referensi untuk mendukung penelitian ini. Penelitian pertama adalah *Conflict, Colonisation and Reconciliation in New Caledonia*, tesis oleh Carolyn Margot Nuttall (2016) program *Master of Philosophy* Australian National University. Nuttall meneliti sejarah Kaledonia Baru yang diikuti oleh momen-momen penting seputar konflik di Kaledonia Baru hingga beberapa tahun terakhir serta mengidentifikasi adanya pengakuan hukum yang akan menuju pada rekonsiliasi. Bab satu dan dua membahas kondisi sosial-budaya mengenai sumber konflik antar suku (internal) sebelum penjajahan yang dilihat dari perspektif Marist Katolik Prancis dan para misionaris dari *London Missionary Society*. Selanjutnya bab tiga menganalisis dampak Perang Dunia II di Kaledonia Baru pada aspek politik dan sosial budaya. Kemudian bab empat dan lima menyelidiki kebangkitan Kanak dan konflik militan

yang memuncak di tahun 1980-an, hingga mediasi yang diprakarsai oleh Prancis dengan kembalinya gereja yang memiliki peran penting di dalam masyarakat hukum adat. Dalam penelitiannya, Nuttall menyimpulkan bahwa peristiwa konflik di masa lalu meninggalkan trauma bagi para penduduk asli Kaledonia Baru dan perlu adanya penanganan lebih lanjut untuk memecahkan masalah tersebut sehingga tercapainya rekonsiliasi yang kekal serta terwujud sebagaimana yang telah diatur dalam Nouméa Accord.

Persamaan penelitian oleh Nuttall dan yang penulis teliti terletak pada aspek ruang yaitu Kaledonia Baru yang ditinjau dari aspek politik dan sosial budaya. Namun demikian, dalam penelitiannya, Nuttall membahas lebih dalam mengenai sejarah konflik di Kaledonia Baru dari sebelum masa kolonialisme Prancis, diikuti oleh masa setelah PD II dan kemudian di tahun 2000-an di mana gereja mengambil peran penting dalam mediasi di masyarakat yang menuju pada rekonsiliasi, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi implementasi Nouméa Accord di Kaledonia Baru dan dampak yang ditimbulkan pada aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.

Penelitian ke dua adalah *Penerapan Undang-undang Laïcité Tahun 2004 dan Posisi Kaum Wanita Muslim Imigran Magribi pada Era Pemerintahan Presiden Jacques Chirac (1994-2007) di Prancis*, skripsi oleh Nuraini Indah Wardani (2016) dari Program Studi Bahasa dan Sastra Prancis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Wardani meneliti latar belakang penerapan Undang-undang *Laïcité* dan tanggapan serta sikap wanita muslim imigran Magribi terkait undang-undang tersebut pada era pemerintahan Presiden Jacques Chirac

(1994-2007). Dalam penelitiannya, Wardani menemukan dua hal yang menjawab rumusan masalahnya, yaitu lahirnya Undang-undang *Laïcité* di Prancis yang membatasi ruang gerak wanita muslim imigran Magribi. Dalam mengatasi hal tersebut, wanita muslim Magribi menerapkan tiga cara untuk tetap dapat menunjukkan identitasnya sebagai umat Islam, antara lain mereka tetap memakai jilbab yang kemudian ditutupi dengan rambut palsu, tidak memakai jilbab karena perlakuan buruk yang kerap kali diterima ketika memakai jilbab, maupun tetap memakai jilbab di lingkungan publik dengan alasan bahwa penggunaan jilbab merupakan sebuah bentuk syariat dalam Islam.

Persamaan penelitian Wardani dengan yang penulis teliti adalah teori yang dipakai yaitu multikausalitas dan deskriptif kausalitas untuk meneliti sejarah politik. Persamaan lainnya terdapat di aspek waktu di mana objek penelitian yang dibahas oleh Wardani dan penulis merupakan produk hukum di era pemerintahan Jacques Chirac. Namun demikian, peneliti memiliki unsur kebaruan dari segi objek penelitian, yaitu Nouméa Accord 1998.



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Nazir (2003, hal.54) menjelaskan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas pada masa sekarang. Raco (2010, hal. 60) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mengandalkan data berupa teks. Hal ini sejalan dengan Koentjaraningrat (1993, hal. 89) yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Sementara itu, penelitian kualitatif menurut Raco (2010, hal. 4) adalah penelitian yang mendalam tentang gejala, fakta, atau realita.

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan teks sebagai data untuk meneliti suatu objek, kondisi, ataupun suatu pemikiran dengan mendalami fakta atau realita yang terjadi.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian yang dilakukan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa

yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Penelitian ini juga berusaha untuk mencari gambaran mengenai suatu kelompok sehingga fenomena kelompok tersebut dapat terungkap secara jelas dan faktual.

Hal ini sesuai dengan sifat sejarah yaitu diakronis. Menurut Galtung (dikutip dari Kuntowijoyo, 2008, hal. 5) sejarah adalah ilmu diakronis sebab sejarah meneliti gejala-gejala yang memanjang dalam waktu tetapi dalam ruang yang terbatas. Sejalan dengan itu, Rachmawati (2016, hal. 3) menyatakan konsep berpikir diakronik dalam sejarah bertujuan untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan peristiwa. Oleh karena itu, penelitian ini mencakup kronologi peristiwa dari sejak dikeluarkannya Matignon Accord di tahun 1988 hingga referendum kemerdekaan Kaledonia Baru tahun 2018. Meskipun terdapat rentang waktu selama 30 tahun, tetapi dalam cakupan ruang hanya terbatas di Kaledonia Baru saja.

3.2 Sumber Data

Pada penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data utama dan data pendukung. Sumber data utama yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa buku-buku, artikel ilmiah, laman internet dan dokumen-dokumen pendukung mengenai peristiwa sejarah di Kaledonia Baru dan juga dinamika yang mengikuti setelah diterbitkannya Nouméa Accord.

Sumber data pendukung dalam penelitian ini adalah sumber tertulis atau bentuk lainnya. Sumber tersebut dapat berupa buku-buku, artikel ilmiah, laman internet dan dokumen-dokumen pendukung mengenai sejarah kolonialisme Prancis di Wilayah Seberang Laut Prancis.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data. Gunawan (2013, hal. 179) menjelaskan bahwa teknik dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam kajian-kajian sosial, terutama sejarah. Sugiyono (2010, hal. 422) menambahkan bahwa terdapat tiga bentuk dokumen, yaitu dokumen tertulis, dokumen gambar dan dokumen karya. Dokumen tertulis dapat berupa cerita, biografi, catatan harian, tabel, dokumen sejarah, peraturan-peraturan, kebijakan, atau kitab suci. Dokumen gambar dapat berupa foto, gambar hidup, atau sketsa. Sementara itu, dokumen karya dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.

Pada penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data berupa dokumen tulisan dan gambar yang berasal dari buku-buku, artikel ilmiah, laman internet, dokumen pemerintah dan sebagainya untuk mendukung penelitian ini.

3.4 Analisis Data

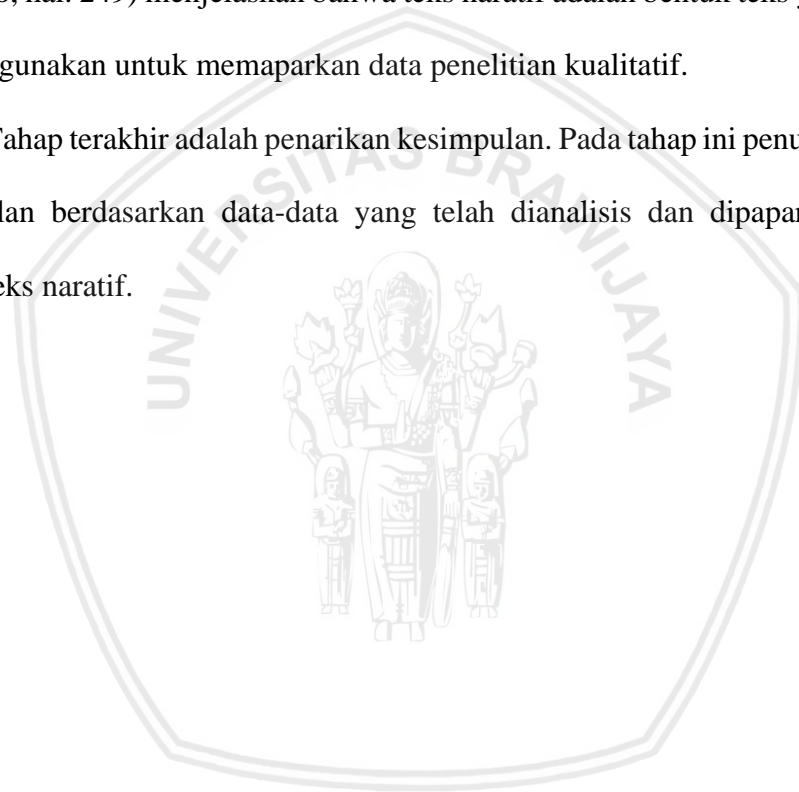
Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles & Huberman. Miles & Huberman (2013, dikutip dari Gunawan, hal. 210) mengemukakan bahwa terdapat tiga tahapan dalam menganalisis data kualitatif, yaitu reduksi data (*data reduction*), pemaparan data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Ketiga tahapan tersebut dilakukan selama dan setelah pengumpulan data.

Tahap pertama yang dilakukan penulis untuk menganalisis data adalah mereduksi data-data yang telah didapatkan. Penulis akan mengategorikan dan mengurutkan data berdasarkan kronologi peristiwa. Kemudian, penulis akan

mengerucutkan data dan memilih data-data yang relevan. Hal ini dilakukan agar penulis dengan mudah mendapatkan informasi dan gambaran sesuai dengan tema penelitian.

Tahap kedua adalah pemaparan data. Pada tahap ini penulis memaparkan data-data dalam bentuk teks naratif. Miles & Huberman (2012, dikutip dari Sugiyono, hal. 249) menjelaskan bahwa teks naratif adalah bentuk teks yang paling sering digunakan untuk memaparkan data penelitian kualitatif.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini penulis menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang telah dianalisis dan dipaparkan dalam bentuk teks naratif.



BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah. Pembahasan pada bab ini meliputi faktor-faktor yang melatarbelakangi implementasi Nouméa Accord 1998 di Kaledonia Baru dan dampak Nouméa Accord 1998 dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya di Kaledonia Baru.

4.1 Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Implementasi Nouméa Accord 1998 di Kaledonia Baru

Perjanjian Matignon-Oudinot Accords 1988 sempat meredam konflik antara kaum pro-kemerdekaan Kanak dan warga pro-loyalis Prancis, melalui pembangunan ekonomi, amnesti dan rekonsiliasi. Akan tetapi ketidakpuasan terhadap implementasinya kemudian menuju pada kesepakatan baru yakni Nouméa Accord 1998.¹

Nouméa Accord 1998 merupakan produk hukum yang berisi janji pemerintah Republik Prancis untuk memberikan kekuasaan politik kepada Kaledonia Baru dan etnis pribumi Kanak hingga wilayah tersebut dapat memutuskan pada 20 tahun mendatang apakah tetap ingin menjadi wilayah Prancis atau negara merdeka melalui sebuah referendum kemerdekaan. Prancis akan tetap mengendalikan sektor militer, kebijakan luar negeri, imigrasi, kepolisian, dan mata uang di Kaledonia Baru hingga tahun tersebut tiba.² Selain itu sektor pendidikan

juga disinyalir menjadi salah satu pilar penting yang akan tetap berada di bawah wewenang pemerintah Prancis.

Melihat isi dan tujuan dari Nouméa Accord 1998 tersebut, Kaledonia Baru menerima perjanjian tersebut melalui pengadaan sebuah referendum di tahun 1998 yang kemudian menjadi salah satu faktor politik dari implementasi Nouméa Accord 1998 di Kaledonia Baru. Selain itu, implementasi Nouméa Accord 1998 di Kaledonia Baru juga dilatarbelakangi oleh faktor sosial budaya dan ekonomi.

4.1.1 Faktor Politik

Perjanjian Matignon Accord 1988 merupakan hasil dari proses rekonsiliasi yang dinegosiasikan oleh Prancis, RPCR dan FLNKS.³ Perjanjian tersebut sebagian besar dilatarbelakangi oleh peristiwa tahun 1988 di mana puluhan *gendarmerie* disandera di pulau Ouvéa dan mengakibatkan jatuhnya korban tewas dari pihak *gendarmerie* maupun Kanak. Matignon Accord 1988 memberikan amnesti bagi para penyandera dan personel militer yang terlibat dalam kejadian tersebut. Perjanjian tersebut juga mengatur tentang pembangunan kembali perdamaian sipil dan menetapkan kerangka kerja untuk status transisi Kaledonia Baru hingga 10 tahun ke depan.

Pada pertengahan 1990-an, partai-partai besar pro dan anti-kemerdekaan di Kaledonia Baru sepakat bahwa referendum yang dijadwalkan pada tahun 1998 yang tertuang di dalam Matignon Accord harus diganti dengan penyelesaian yang dinegosiasikan. Pimpinan FLNKS mengisyaratkan bahwa mereka bersedia menyerahkan referendum penentuan nasib sendiri berdasarkan prinsip dekolonisasi PBB dan sepakat untuk berpartisipasi dalam proses tersebut yang dilaksanakan

dalam kerangka hukum Prancis. Sebagai imbalannya mereka mengupayakan adanya transisi yang dinegosiasikan ke kemerdekaan berdasarkan kesepakatan konsensus dengan kekuatan politik lainnya. Masalah utama yang harus diatasi meliputi: pernyataan permintaan maaf dan rekonsiliasi dari Prancis, transfer kekuasaan dari Paris (pusat) ke Noumea, tindakan Prancis untuk menghentikan atau mengatur imigrasi ke wilayah tersebut, dan kontrol lokal terhadap sumber daya mineral dan alam.

Setelah serangkaian negosiasi, pada tanggal 5 Mei 1998 Nouméa Accord ditandatangani oleh pemerintah Prancis, FLNKS dan RPCR. Undang-undang selanjutnya memberlakukan hal-hal pokok dari perjanjian ini yaitu:

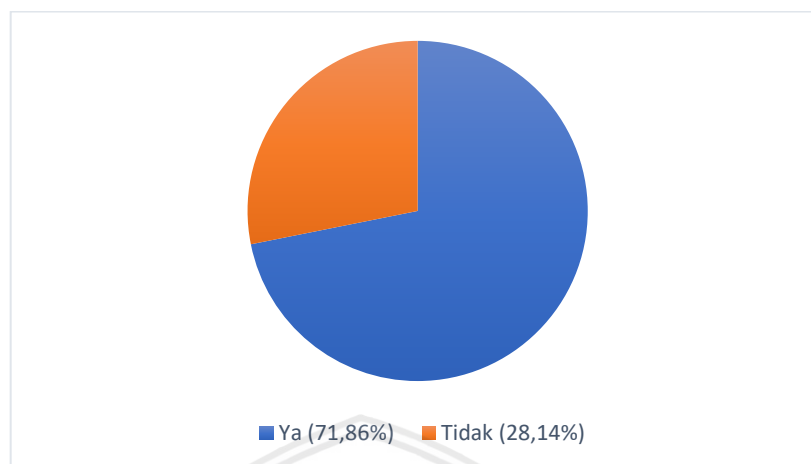
- 1) Perubahan konstitusional terhadap status Kaledonia Baru di dalam Republik Prancis, menciptakan kedaulatan bersama dan status kewarganegaraan baru untuk penduduk Kaledonia Baru, dan mengakhiri status yang sebelumnya adalah bagian dari Wilayah Seberang Laut Prancis (*Territoire d'outre mer*).
- 2) Pemilihan umum pada bulan Mei 1999 untuk lembaga-lembaga politik baru untuk menggantikan Kongres Teritorial yang ada.
- 3) Transfer kekuasaan administratif dari Paris (pusat) ke otoritas lokal dan Kongres baru di Kaledonia Baru.
- 4) Langkah-langkah untuk mengakui kebudayaan dan identitas Kanak serta pengakuan terhadap adanya kolonialisme yang terjadi di wilayah tersebut.
- 5) Masa transisi 15-20 tahun sebelum dilaksanakannya referendum kemerdekaan.

Setelah perjanjian penandatanganan pada tanggal 5 Mei 1998, Majelis Nasional Prancis dan Senat mengeluarkan amandemen terhadap konstitusi Prancis, yang disetujui pada pertemuan Parlemen di Versailles pada tanggal 6 Juli 1998. Perjanjian tersebut kemudian diratifikasi oleh hampir 72% populasi melalui sebuah referendum pada tanggal 8 November 1998.⁴ Isi referendum tersebut adalah “*Approuvez-vous l'Accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998?*” (Apakah Anda menyetujui Perjanjian Kaledonia Baru yang ditandatangani di Noumea pada 5 Mei 1998?)⁵ Berikut adalah tabel dan gambar hasil perhitungan suara dalam referendum 1998 di Kaledonia Baru.

Tabel 4.1.1.1 Hasil referendum 1998 di Kaledonia Baru (Sumber: legifrance.gouv.fr)

Pilihan	Jumlah	% Terdaftar	% Pemilih	% Suara
Ya	55.400	51,92	69,95	71,86
Tidak	21.697	20,33	27,39	28,14
Suara Masuk	77.097	72,26	97,34	100
Suara Kosong	2.150	1,97	2,66	
Total Suara	79.202	74,23	100	
Abstain	27.496	25,77		
Terdaftar	106.698	100		

Berdasarkan tabel 4.1.1.1 dapat dilihat bahwa pada referendum 1998 di Kaledonia Baru terdapat 106.698 pemilih terdaftar. Total suara masuk adalah sebanyak 79.202 suara yang terdiri dari 55.400 suara setuju terhadap Nouméa Accord dan 21.697 suara tidak setuju. Sementara itu, sebanyak 27.496 pemilih terdaftar abstain atau tidak berpartisipasi dalam referendum tersebut. Dari data total suara yang masuk diperoleh persentase suara sebagai berikut.



Gambar 4.1.1.1 Diagram hasil referendum 1998 (Sumber: legifrance.gouv.fr)

Berdasarkan Gambar 4.1.1.1, dapat dilihat bahwa pada referendum tahun 1998 sebanyak 71,86% penduduk Kaledonia Baru yang berpartisipasi dalam referendum 1998 menyetujui penerapan Nouméa Accord di Kaledonia Baru hingga 20 tahun ke depan.

Dengan demikian, adanya proses diplomasi yang dilakukan antara partai-partai besar di Kaledonia Baru yang mewakili suara pro dan anti kemerdekaan dengan pemerintah Prancis hingga berujung pada kesepakatan penerapan Nouméa Accord di Kaledonia Baru yang diratifikasi oleh para penduduk wilayah tersebut melalui sebuah referendum menjadi faktor politik sekaligus faktor utama yang melatarbelakangi implementasi Nouméa Accord di Kaledonia Baru.

4.1.2 Faktor Sosial Budaya

a. Imigrasi

Perlawanan Kanak terhadap kolonialisme telah dimulai sejak pendaratan militer Prancis yang pertama di Kaledonia Baru pada tahun 1844 dan juga perang antar klan yang meningkat karena kedatangan para misionaris yang menerapkan

hukum gereja yang bertentangan dengan hukum adat setempat.⁶ Setelah resmi menjadi *Territoire de l'Outre-mer* atau Wilayah Seberang Laut Prancis pada tahun 1946, konflik antara warga pro-loyalis Prancis dan pro-kemerdekaan etnis pribumi Kanak terus berlanjut seiring dengan derasnya arus migrasi orang-orang Eropa serta impor tenaga kerja yang dilakukan oleh Prancis dari luar wilayah Kaledonia Baru dianggap “menyingkirkan” kaum pribumi.⁷ Perkembangan populasi imigran di Kaledonia Baru dapat dilihat pada tabel 4.1.2.1.

Tabel 4.1.2.1 Populasi penduduk Kaledonia Baru (Sumber: ISEE-INSEE, dikutip dari Fisher, 2013)

Tahun	Jumlah orang Kanak	%	Jumlah orang Eropa	%	Jumlah yang lain	%	Total
1887	42.500	68,0	18.800	30,0	1.200	2,0	62.500
1901	29.100	53,5	22.750	41,8	2.550	4,7	54.400
1911	28.800	56,9	17.300	34,2	4.500	8,9	50.600
1931	28.600	50,0	15.200	26,6	13.400	23,4	57.200
1946	31.000	49,4	18.100	28,9	13.600	17,0	62.700
1956	34.969	51,1	25.260	36,7	8.351	12,2	68.580
1969	46.200	46,0	41.268	41,0	13.111	13,0	100.579
1979	55.598	41,7	50.757	38,1	26.878	20,2	133.233
1983	61.870	42,6	53.974	37,1	29.524	20,3	145.368
1989	73.598	45,0	55.805	34,0	34.770	21,0	164.173
1996	86.788	44,1	67.151	34,1	42.897	21,8	196.836

Tabel 4.1.2.1 menunjukkan rincian persentase populasi penduduk Kaledonia Baru dalam berbagai sensus sejak 1887. Dapat dilihat bahwa persentase jumlah orang Eropa di Kaledonia Baru selalu menempati urutan kedua terbanyak setelah populasi orang Kanak. Kemudian peningkatan populasi dalam kategori “lain” antara tahun 1911 dan 1931 disebabkan oleh impor tenaga kerja oleh Prancis dari luar wilayah Kaledonia Baru khususnya dari Indonesia dan Vietnam untuk mengelola sumber daya alam di Kaledonia Baru. Impor tenaga kerja dari Vietnam

disebabkan karena saat itu negara tersebut merupakan koloni Prancis, sementara adanya aturan *Koeli Ordonantie* pada 1880 yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja di perkebunan Belanda di Sumatra, Prancis kemudian meminta buruh untuk pertambangan nikel di Kaledonia Baru.⁸ Sementara itu, penurunan populasi di tahun 1946 hingga tahun 1956 merupakan dampak dari Perang Dunia II. Kemudian jumlah populasi “lain” (di luar populasi Kanak dan Eropa) di tahun 1969 dan seterusnya berangsur meningkat seiring dengan tingginya permintaan Nikel di dunia sehingga Prancis kembali mengimpor tenaga kerja terutama dari Wallis, Futuna, Tahiti, Indonesia dan Vietnam.⁹

Setelah serangkaian konflik yang terjadi pada tahun 1980-an, hal-hal yang berkaitan dengan migrasi masih menjadi masalah yang sensitif. Etnis pribumi Kanak menjadi minoritas di wilayah mereka sendiri sebagai dampak dari adanya migrasi tersebut. Meskipun tingkat kelahiran di masyarakat Kanak tinggi, namun populasi Kanak menurun dalam satu dekade setelah adanya Matignon Accord 1988 dari 45% menjadi 44,1% dari jumlah keseluruhan populasi pada tahun 1996. Sementara itu, populasi orang Eropa meningkat lebih dari 10.000 pada periode yang sama.¹⁰

Rincian perbandingan pertumbuhan jumlah populasi imigran sebelum Matignon Accord 1988 (1983-1989) dan sesudahnya (1989-1996) dapat dilihat pada table 4.1.2.2.

Tabel 4.1.2.2 Ringkasan demografi penduduk Kaledonia Baru (Sumber: ISEE-INSEE, dikutip dari Fisher, 2013)

	1983-1989	1989-1996
	(6 Tahun)	(7 Tahun)
Populasi (awal periode)	145.368	164.173
Populasi (akhir periode)	164.173	196.836
Variasi (awal hingga akhir)	18.805	32.663
Net. peningkatan alami	17.826	23.552
Net. migrasi	979	9.111
Peningkatan alami (%)	2,0	1,9
Net. migrasi (%)	0,1	0,7

Berdasarkan data pada tabel 4.1.2.2 dapat dilihat bahwa pada periode 1983-1989 jumlah imigran yang masuk ke Kaledonia Baru mencapai 0,1% dari total populasi penduduk dan setelah dikeluarkannya Matignon Accord 1988 yaitu pada periode 1989-1996 jumlah imigran di Kaledonia Baru naik menjadi 0,7% dari total populasi penduduk.

Oleh karena itu, muncul tuntutan kebijakan terkait dengan masuk dan menetapnya orang asing di Kaledonia Baru. Kebijakan yang dimaksud berupa peraturan ketat untuk orang-orang yang tidak menetap di Kaledonia Baru serta kebijakan terhadap hak-hak mengenai ketenagakerjaan penduduk lokal.

Masalah imigrasi menjadi salah satu faktor sosial budaya yang melatarbelakangi dikeluarkannya Nouméa Accord, karena tingginya angka migrasi menyebabkan penduduk pribumi menjadi minoritas di wilayah mereka sendiri sehingga hal tersebut menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya konflik antar penduduk di Kaledonia Baru.

b. Penyelesaian Konflik dan Pengakuan Identitas Kanak

Konflik antar penduduk terus berlanjut disertai dengan upaya pemerintah yang gagal meredam suasana “panas” di wilayah tersebut. Pemerintah konservatif

Jacques Chirac berupaya menekan aktivis Kanak untuk menuju perdamaian dan rekonsiliasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Fabius-Pisani serta Pons Statute, namun upaya tersebut justru menyulut amarah gerakan nasionalis Kanak karena dianggap sebagai kembalinya perbudakan oleh kolonialisme. Penolakan tersebut ditandai dengan peristiwa “*les événements*” dari tahun 1984 dan puncaknya pada tahun 1988 yang berujung pada tewasnya 25 orang yang di antaranya adalah Kanak, militer dan *gendarmerie*.¹¹

Selanjutnya Matignon Accord dirancang untuk meredam konflik tersebut. Meskipun perjanjian tersebut disambut dengan baik di Prancis, namun pada kenyataannya Matignon Accord tidak banyak menunjukkan langkah konkret untuk menuju pada upaya rekonsiliasi. Perjanjian tersebut dianggap kurang menguntungkan oleh orang Kanak dalam artian bahwa tidak pernah ada keadilan bagi orang-orang Ouvéa yang telah berjuang demi mengangkat isu kemerdekaan di Kaledonia Baru untuk mendapat perhatian dunia. Prancis justru dianggap berupaya untuk “meredam” kasus tersebut.¹²

Perjanjian tersebut akhirnya disepakati oleh ketiga pihak yakni Prancis, Jean-Marie Tjibaou selaku pimpinan partai pro-kemerdekaan FLNKS dan Jacques Lafleur selaku pimpinan partai pro loyalis Prancis RPCR. Tjibaou bersedia menandatangani perjanjian tersebut dengan tujuan agar tidak ada pertumpahan darah lebih lanjut meskipun perjanjian tersebut belum sepenuhnya memenuhi tuntutan Kanak.¹³

Perjanjian Matignon kemudian dipresentasikan di hadapan 300 delegasi pro-kemerdekaan di Ouvéa. Setelah 20 jam musyawarah, disimpulkan bahwa

perjanjian tersebut gagal dalam memberikan jaminan keadilan yang diperlukan, dan kemerdekaan masih jauh serta tidak pasti.¹⁴ Hal tersebut menyulut kemarahan warga Kanak dan satu tahun kemudian pada tanggal 4 Mei 1989 pimpinan FLNKS yakni Jean-Marie Tjibaou dan Yeiwéné Yeiwéné dibunuh di Ouvéa.¹⁵ Pembunuhan tersebut dilatarbelakangi oleh kekecewaan terhadap keterlibatan Tjibaou dalam penandatanganan Matignon Accord yang dilakukan tanpa melakukan musyawarah terlebih dahulu dan tindakan tersebut dianggap sebagai pengkhianatan serta pelanggaran hukum adat di mana seharusnya Tjibaou juga bernegosiasi dengan keluarga korban.¹⁶ Matignon Accord dianggap tidak bersifat universal dan diputuskan tanpa konsultasi adat serta tidak ada kejelasan untuk mencapai kemerdekaan sehingga gagal dalam menyelesaikan konflik yang terus dipendam oleh beberapa orang dan merosot ke dalam krisis yang lebih lanjut.¹⁷

Di tahun yang sama, implementasi “*statut Rocard*” yang merupakan bagian dari Matignon Accord dilakukan dengan mempertimbangkan hak Kanak. Hal tersebut diperlukan guna memperhatikan keistimewaan warga Kanak. Implementasi tersebut berupa pembentukan *Agence de Développement de la Culture Kanak* (Badan Pengembangan Budaya Kanak) dengan tujuan pengembangan dan mempromosikan budaya Kanak di Kaledonia Baru., pembentukan rancangan pelatihan yang dikenal dengan istilah “*400 cadres*” dan pembangunan Pusat Kebudayaan Tjibaou. Gagasan tersebut diterima oleh FLNKS sebagai sebuah “solusi yang dapat dinegosiasikan”.¹⁸

Dengan adanya “solusi yang dapat dinegosiasikan”, hal ini berarti tidak ada hal yang secara mutlak ditetapkan oleh Prancis pada perjanjian berikutnya, melainkan kesepakatan melalui proses negosiasi.

4.1.3 Faktor Ekonomi

Pada tahun 1960-an, Prancis membatasi ruang gerak penduduk lokal Kaledonia Baru dengan mengambil alih hak properti di bawah hukum Billotte. Hukum tersebut menetapkan kebijakan sistem pajak di mana keuntungan pajak akan dibagikan kepada perusahaan pertambangan Prancis ataupun internasional yang menginvestasikan lebih dari 575 juta franc CFP (Fcfp) serta memaksa semua calon penambang untuk mengajukan otorisasi penambangan pribadi dari Kementerian Perindustrian Prancis.¹⁹

Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi perlawanan Kanak di Kaledonia Baru. Kanak merasa bahwa Prancis telah mengeksploitasi wilayah mereka tanpa adanya timbal balik berupa bayaran atas penambangan sumber daya alam di sana, serta pengambilalihan hak properti yang menandakan perbudakan ekonomi oleh kolonialisme, terlebih lagi Prancis mengimpor tenaga kerja dari luar Kaledonia Baru, sehingga pemanfaatan tenaga penduduk lokal kurang.

Keseimbangan distribusi pengelolaan ekonomi di Kaledonia Baru antara kepentingan adat dan non-adat kemudian ditetapkan oleh Michel Rocard dalam Oudinot Accord yang diratifikasi setelah penandatanganan Matignon Accord yaitu untuk memulihkan keseimbangan ekonomi, sosial dan budaya.²⁰ Sejauh ini sumber daya alam yang paling utama di Kaledonia Baru adalah nikel, dan hal tersebut telah

menjadi fokus utama dalam upaya *rebalancing*. Salah satu upaya *rebalancing* dalam bidang sosial-ekonomi yang tertuang dalam Matignon Accord adalah rancangan pelatihan “400 *cadres*” yaitu sebuah program pelatihan untuk orang Kanak guna mendapatkan pengalaman profesional yang bertujuan untuk meningkatkan potensi dalam mengelola serta mengembangkan ekonomi Kaledonia Baru.²¹

Upaya *rebalancing* ekonomi lainnya adalah distribusi anggaran yang diberikan pemerintah Prancis dan pendapatan pajak daerah untuk Provinsi Utara dan Provinsi Kepulauan sebesar 75% karena kurang berkembang secara ekonomi dan untuk Provinsi Selatan sebesar 25%. Kemudian untuk distribusi pendapatan negara dialokasikan untuk Provinsi Selatan sebesar 50% karena dua pertiga populasi penduduk Kaledonia Baru bermukim di sana dan daerah tersebut juga berkontribusi atas 80% pendapatan bagi Kaledonia Baru. Sementara itu, 50% lainnya dialokasikan untuk Provinsi Utara dan Provinsi Kepulauan.²²

Pada awal tahun 1990-an, Prancis juga membantu Provinsi Utara yang dihuni oleh mayoritas etnis pribumi Kanak untuk memperoleh *Soci ete Miniere du Sud Pasifique* (SMSP) dari Jacques Lafleur dengan penjualan saham sebesar 85% ke *Societe de financement et d'investissement de la Nord Province* (SOFINOR) seharga Fcfp 1,8 miliar yang dibiayai oleh Prancis. SMSP atau Perusahaan Penambangan Pasifik Selatan adalah grup pertambangan dan metalurgi Prancis yang berbasis di Kaledonia Baru.²³

Dengan adanya ratifikasi Oudinot Accord mengenai keseimbangan pengelolaan ekonomi, SMSP kemudian menjadi ujung tombak integrasi Kanak dan

separatis yang mayoritas berada di Provinsi Utara dalam kontrol dan eksploitasi sumber daya pertambangan yang menjadi sektor utama perekonomian di Kaledonia Baru.

Dengan demikian, masalah utama perekonomian terkait dengan upaya *rebalancing* ekonomi serta pengelolaan sumber daya alam di Kaledonia Baru menjadi hal penting yang perlu ditinjau kembali pada kesepakatan berikutnya.

4.2 Dampak Nouméa Accord 1998 di Kaledonia Baru

Nouméa Accord lahir dari hasil serangkaian negosiasi yang dilakukan antara Prancis, perwakilan dari partai pro-kemerdekaan FLNKS dan perwakilan dari partai pro-loyalis Prancis RPCR. Dengan adanya “solusi yang dinegosiasikan”, hal ini berarti tidak ada hal yang secara mutlak ditetapkan oleh Prancis pada perjanjian tersebut, melainkan kesepakatan melalui proses negosiasi.

Melalui Nouméa Accord 1998 pemerintah Republik Prancis memberikan kekuasaan politik kepada Kaledonia Baru dan etnis pribumi Kanak hingga wilayah tersebut dapat memutuskan pada 20 tahun mendatang apakah tetap ingin menjadi wilayah Prancis atau negara merdeka melalui sebuah referendum kemerdekaan. Prancis akan tetap mengendalikan sektor militer, kebijakan luar negeri, imigrasi, kepolisian, dan mata uang di Kaledonia Baru hingga tahun tersebut tiba²⁴ yang kemudian memberikan dampak dalam bidang politik, sosial budaya serta ekonomi di Kaledonia Baru.

4.2.1 Dampak di Bidang Politik

a. Pembagian Wilayah dan Transfer Kekuasaan

Kaledonia Baru terbagi atas tiga provinsi yang sebelumnya telah diatur dalam Matignon Accord 1988. Ketiga provinsi tersebut adalah Provinsi Utara (*la province Nord*), Provinsi Selatan (*la province Sud*) dan Provinsi Kepulauan (*la province des îles Loyauté*). Pembagian wilayah tersebut tetap dipertahankan oleh Nouméa Accord 1998 sebagaimana yang tertuang dalam Hukum Organik Nomor 99-209 tanggal 19 Maret 1999 tentang Kaledonia Baru. Pembagian wilayah di Kaledonia Baru dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.2.1.1 Pembagian wilayah di Kaledonia Baru (Sumber: KJRI Nouméa)

Pada Gambar 4.2.1.1 dapat dilihat bahwa pulau utama (*Grand Terre*) terbagi atas dua wilayah yaitu Provinsi Utara (*Province Nord*) yang terdiri dari 17 kota dengan kota Koné sebagai ibu kota dan Provinsi Selatan (*Province Sud*) yang terdiri dari 14 kota dengan kota Nouméa sebagai ibu kota. Kemudian di sebelah timur pulau utama terdapat tiga kepulauan kecil yang merupakan Provinsi Kepulauan (*îles Loyauté*) dengan kota Lifou sebagai ibu kota.

Masing-masing provinsi memiliki sebuah majelis wilayah yang memegang kekuasaan legislatif dan seorang presiden yang memegang kekuasaan eksekutif. Majelis wilayah dan presiden dipilih melalui pemilihan umum di masing-masing provinsi setiap lima tahun sekali. Jumlah anggota majelis wilayah di setiap provinsi berbeda, yakni terdapat 22 anggota majelis wilayah untuk Provinsi Utara, 40 anggota majelis wilayah untuk Provinsi Selatan dan 14 anggota majelis wilayah untuk Provinsi Kepulauan.

Hal tersebut sejalan dengan hukum yang tertuang pada pasal 77 Konstitusi Republik Prancis yang diterbitkan pada tahun 1998 dan diperbarui pada tahun 2007 yang menetapkan status baru untuk Kaledonia Baru yaitu *sui generis* atau hak pemerintahan sendiri. Hukum tersebut juga menetapkan peraturan mengenai implementasi Nouméa Accord 1998 yang mengatur transfer kekuasaan tertentu dari Prancis ke Kaledonia Baru, pembentukan lembaga pemerintahan dan peralihan kekuasaan dalam waktu 20 tahun ke depan melalui referendum. Pembagian kewenangan antara Prancis dan Kaledonia Baru berdasarkan transfer kekuasaan dari Pusat ke Wilayah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2.1.1 Pembagian kewenangan Prancis dan Kaledonia Baru. (Sumber: KJRI Noumea)

Kewenangan Pemerintah Prancis	Kewenangan Pemerintah Wilayah Kaledonia Baru
Imigrasi, Angkatan Bersenjata, Hubungan Luar Negeri, Peradilan, Hukum Perdata Umum, Pendidikan Tinggi.	Kepolisian dan keamanan laut dan udara, Keamanan individu di Laut Territorial, Pendidikan dan pengajaran sekolah publik tingkat dasar (9 tahun), Pengaturan sekolah swasta tingkat dasar (6 tahun), Hukum Dagang dan Status Sipil, Perburuhan, Asuransi, Perpajakan, Investasi asing, Kekayaan alam nikel dan metalurgi, Akses pekerjaan ekspatriat, Hak tanah adat, Pos, Komunikasi Audiovisual, Administrasi dan Kelembagaan Pemda provinsi dan kota, termasuk hukum daerah.

Dengan demikian Nouméa Accord memberikan wewenang kepada Kaledonia Baru untuk mengatur pemerintahan sendiri di sektor-sektor tertentu hingga 20 tahun kedepan, dan setelahnya wilayah tersebut akan menentukan nasib kemerdekaannya melalui referendum.

b. Batasan Pemilih Dalam Referendum Kemerdekaan

Terdapat tiga kategori daftar pemilih di Kaledonia Baru yang antara lain adalah daftar umum untuk pemilihan Kongres, Presiden Prancis dan Parlemen Prancis yang terdiri dari semua warga negara Prancis, kemudian daftar pemilih khusus untuk pemilihan majelis wilayah dan *liste électorale spéciale* (LESC) yaitu daftar pemilih khusus untuk referendum.²⁴ LESC dibuat untuk membatasi hak suara terhadap pendatang khususnya imigran yang diimpor oleh Prancis ke Kaledonia Baru dan memberikan peluang yang lebih besar kepada penduduk asli Kanak untuk menentukan nasib wilayah mereka.²⁵ Untuk terdaftar dalam LESC, pemilih harus memenuhi persyaratan setidaknya satu dari kondisi berikut:

1. Terdaftar pada daftar pemilih khusus untuk referendum tahun 1998 (atau yang memenuhi persyaratan pemilih referendum 1998 tetapi tidak terdaftar).
2. Lahir di Kaledonia Baru dan terdaftar dalam pemilih khusus untuk provinsi (LESP).
3. Bertempat tinggal di Kaledonia Baru untuk 20 tahun ke depan.
4. Lahir sebelum tanggal 1 Januari 1989 dan tinggal di Kaledonia Baru dari tahun 1988 hingga 1998.
5. Lahir setelah tanggal 1 Januari 1989 dengan salah satu orang tua yang berada dalam daftar pemilih khusus untuk referendum 1998 (LESC) (atau yang memenuhi persyaratan pemilih referendum 1998 tetapi tidak terdaftar).
6. Lahir dan bertempat tinggal di Kaledonia Baru dalam waktu tiga tahun berturut-turut (sebelum tanggal 31 Agustus 2018).

Dengan demikian referendum kemerdekaan 2018 hanya dapat diikuti oleh pemilih terdaftar yang memenuhi salah satu dari persyaratan di atas.

c. Referendum Kemerdekaan 2018

Referendum kemerdekaan 2018 adalah referendum kemerdekaan kedua yang dilaksanakan di Kaledonia Baru di mana pada tahun 1987 diadakan referendum kemerdekaan pertama setelah serangkaian peristiwa konflik di Kaledonia Baru. Referendum kemerdekaan pertama menghasilkan suara sebanyak 98,30% di mana rakyat Kaledonia Baru memilih untuk tetap bersama Prancis²⁶,

namun tingkat partisipasi masyarakat dalam referendum tersebut tidak terlalu tinggi yakni sekitar 59,10% karena adanya boikot oleh kelompok separatis.²⁷

Referendum 2018 merupakan bagian dari perjanjian Nouméa Accord yang mengatur tentang referendum kemerdekaan di Kaledonia Baru yang akan berlangsung antara tahun 2014 dan 2018 dan tidak menutup kemungkinan untuk diadakan referendum kemerdekaan lagi di tahun-tahun berikutnya jika diperlukan. Referendum kemerdekaan 2018 diselenggarakan pada tanggal 4 November 2018 berdasarkan hasil pemungutan suara oleh Kongres Kaledonia Baru pada tanggal 19 Maret 2018.²⁸

Referendum tersebut secara resmi disebut “*consultation sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté*” (konsultasi untuk Kaledonia Baru mencapai kedaulatan penuh).²⁹ Sementara itu, pertanyaan yang akan diajukan dalam referendum sempat diperdebatkan antara kaum pro-kemerdekaan dan pro-loyalis terkait istilah “*pleine souveraineté*” (kedaulatan penuh) dan “*indépendance*” (kemerdekaan).³⁰ Setelah adanya negosiasi antara pemerintah Édouard Philippe dan berbagai pihak terkait³¹, akhirnya diputuskan pertanyaan yang diajukan dalam referendum kemerdekaan adalah “*Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?*” (Apakah Anda ingin Kaledonia Baru memperoleh kedaulatan penuh dan menjadi merdeka?).³² Berikut adalah hasil referendum kemerdekaan 2018 di Kaledonia Baru.

Tabel 4.2.1.2 Hasil referendum kemerdekaan 2018 di Kaledonia Baru
(Sumber: elections-nc.fr)

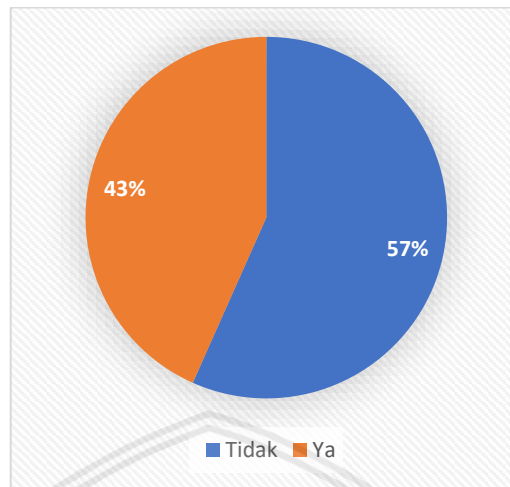
	Terdaftar	Pemilih	% Partisipasi	% Suara Kosong	% Suara Masuk	Jumlah Suara "YA"	% Suara "YA"	Jumlah Suara "TIDAK"	% Suara "TIDAK"
Province des Iles	21.406	13.095	61,17	1,21	98,79	10.631	82,18	2.305	17,82
Province Nord	40.048	34.445	86,01	1,42	98,58	25.747	75,83	8.208	24,17
Province Sud	112.711	93.559	83,01	1,62	98,38	23.821	25,88	68.221	74,12
Nouvelle-Calédonie	174.156	141.099	81,01	1,54	98,46	60.199	43,33	78.734	56,67

Berdasarkan tabel 4.2.1.2 dapat diketahui bahwa pada referendum kemerdekaan 2018 di Kaledonia Baru terdapat 174.156 pemilih terdaftar dalam referendum tersebut, sementara itu terdapat 141.009 pemilih atau tingkat partisipasi sebesar 81% dari jumlah pemilih terdaftar. Berikut adalah hasil suara berdasarkan persebaran wilayah.



Gambar 4.2.1.2 Hasil referendum kemerdekaan 2018 berdasarkan persebaran wilayah (Sumber: www.elections-nc.fr)

Gambar 4.2.1.2 menunjukkan hasil suara berdasarkan persebaran wilayah di Kaledonia Baru. Jika dilihat berdasarkan gambar persebaran wilayah, mayoritas penduduk Provinsi Utara dan Provinsi Kepulauan yang dihuni oleh mayoritas penduduk pribumi etnis Kanak serta lebih dari satu perempat penduduk Provinsi Selatan memilih “ya” untuk kedaulatan penuh serta kemerdekaan Kaledonia Baru, namun demikian Provinsi Selatan yang dihuni oleh sekitar 65% dari total penduduk Kaledonia Baru memberikan suara sebanyak 74,12% terhadap penolakan atas kedaulatan penuh dan kemerdekaan Kaledonia Baru. Hasil akhir perolehan suara dalam referendum Kaledonia Baru dapat dilihat lebih jelas pada gambar berikut.



Gambar 4.2.1.3 Hasil akhir perolehan suara dalam referendum kemerdekaan 2018 di Kaledonia Baru

Dari Gambar 4.2.1.3, dapat disimpulkan bahwa sebanyak hampir 57% penduduk Kaledonia Baru yang berpartisipasi dalam referendum kemerdekaan 2018 memilih “tidak” untuk kedaulatan penuh dan kemerdekaan Kaledonia Baru. Dengan demikian, Kaledonia Baru akan tetap menjadi bagian dari Prancis. Sementara itu, sesuai dengan yang tertuang dalam Nouméa Accord bahwa referendum kemerdekaan dapat dilaksanakan kembali jika diperlukan. Oleh karena itu, terdapat sebuah konsultasi lebih lanjut mengenai referendum kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 di Kaledonia Baru.³³

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak Nouméa Accord di bidang politik memberikan pengaruh yang besar dalam sistem pemerintahan Kaledonia Baru dan status wilayah tersebut setelah pelaksanaan referendum kemerdekaan di tahun 2018 maupun di masa mendatang sebagaimana yang tertuang dalam Nouméa Accord.

4.2.2 Dampak di Bidang Sosial Budaya

a. Imigrasi

Dalam pembagian kekuasaan antara Prancis dan Kaledonia Baru yang ditetapkan oleh Nouméa Accord, Prancis berwenang atas pengaturan imigrasi di wilayah tersebut. Sementara itu pada Pasal 3.2.2 dalam perjanjian tersebut, lembaga eksekutif di Kaledonia Baru berwenang atas aturan yang berkaitan dengan masuk dan tinggalnya orang asing di wilayah tersebut yang sejalan dengan Pasal 3.1.1 tentang perlindungan hak-hak pekerja lokal. Namun Pasal 34 Undang-Undang Organik tahun 1999 memberikan Komisaris Tinggi Prancis hak untuk “berkonsultasi” dengan pemerintah daerah terkait izin masuk dan tinggalnya orang asing. Pemerintah Prancis memiliki kendali atas imigrasi di Kaledonia Baru dengan pemerintah lokal yang berwenang atas persetujuan izin kerja untuk orang asing. Namun, pemerintah Kaledonia Baru tidak memiliki kekuatan untuk membatasi masuk atau dipekerjakannya warga negara Prancis di wilayah tersebut terlepas dari ketentuan Pasal 3.1.1 dalam Nouméa Accord. Dampak dari wewenang pengaturan imigrasi oleh Prancis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2.2.1 Kedatangan eksternal berdasarkan wilayah antara tahun 2004 hingga 2014 (Sumber: isee.nc)

	Kedatangan eksternal 2004-2009	Kedatangan eksternal 2009-2014
Provinsi Kepulauan	239	338
Provinsi Utara bagian timur	456	531
Provinsi Utara bagian barat	986	2.106
Provinsi Selatan bagian pedesaan	764	763
Grand-Nouméa	17.800	18.775
Total	20.245	22.513

Berdasarkan data pada tabel 4.2.2.1, total imigran yang masuk ke Kaledonia Baru meningkat dari tahun 2004 hingga tahun 2014. Dengan demikian migrasi di Kaledonia Baru meningkat dari sebelum hingga dikeluarkannya Nouméa Accord berdasarkan kebijakan imigrasi oleh Prancis. (Lihat tabel 4.1.2.2 sebagai data acuan).

Dengan demikian salah satu dampak dari Nouméa Accord di bidang sosial budaya adalah adanya kebijakan imigrasi yang menjadi wewenang Prancis, namun Kaledonia Baru berwenang atas aturan yang berkaitan dengan masuk dan tinggalnya orang asing di wilayah tersebut guna melindungi hak-hak pekerja lokal. Hal tersebut sebagai upaya untuk meminimalisir konflik antar penduduk yang dilatarbelakangi oleh isu imigrasi.

b. Identitas Kanak

Sesuai dengan Pasal 1 di Nouméa Accord yang mengatur tentang “Identitas Kanak”, lembaga baru seperti senat adat telah didirikan dan masih dilakukan konsultasi lebih lanjut oleh legislator. Kemudian pada tahun 2007 dibentuk sebuah komite untuk mempertimbangkan simbol-simbol Kaledonia Baru dan pada tahun 2008 pemerintah Kaledonia Baru menyetujui lagu kebangsaan yaitu “*Soyons unis, devenons frères*” (Mari Bersatu, Mari Bersaudara) dan moto yaitu “*Terre de parole, terre de partage*” (Tempat Bersuara, Tempat Berbagi) untuk wilayah tersebut meskipun istilah nama dan bendera masih menjadi perdebatan. Terlepas dari ketentuan dalam Nouméa Accord mengenai status khusus sebagai “negara *sui generis*”, Prancis dan masyarakat pro-loyalis secara aktif menggunakan istilah

“wilayah”, sedangkan masyarakat pro-kemerdekaan menggunakan istilah “negara” untuk menyebut Kaledonia Baru.³⁴

Pasal 1.5 dalam Nouméa Accord memberikan wewenang kepada masyarakat Kaledonia Baru untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan identitas kenegaraan seperti bendera, sehubungan dengan itu Pasal 5 dalam Undang-undang Organik tahun 1999 juga mengatur tentang identitas kenegaraan yang diserahkan kepada Kaledonia Baru. Pada tahun 2010 diputuskan bahwa bendera Kanaky harus dikibarkan berdampingan dengan bendera Prancis, hal tersebut merupakan solusi akhir yang disetujui oleh kedua pihak antara pro-loyalis dan pro-kemerdekaan setelah adanya protes dari pihak pro-loyalis mengenai bendera Kanaky yang lebih condong ke masyarakat adat Kanak di Provinsi Utara dan Provinsi Kepulauan, sedangkan Provinsi Selatan yang dihuni oleh mayoritas penduduk pro-loyalis tidak setuju dengan bendera tersebut. Akhirnya kedua bendera Kanaky dan Prancis diputuskan untuk mewakili bagian dari identitas Kaledonia Baru, Melanesia dan Oseania yang tidak terpisahkan dari identitas Eropa dan Prancis.³⁵



Gambar 4.2.2.1 Bendera Prancis dan Kanaky (Sumber: Inc.nc)

Simbol-simbol kenegaraan yang menjadi representasi masyarakat adat etnis pribumi merupakan salah satu poin penting yang dinegosiasikan dalam pembentukan Nouméa Accord. Oleh karena itu, simbol-simbol kenegaraan kemudian diatur oleh pasal 1.5 “*Les symboles*” atau simbol-simbol dalam Nouméa Accord untuk menjaga identitas penduduk asli Kaledonia Baru sebagai masyarakat adat.

c. Pelatihan, Kepegawaian dan Pendidikan

Program “400 *cadres*” atau 400 manajer yang dirancang oleh Matignon Accord terimplementasi dengan baik dan hasilnya positif. Program tersebut awalnya bertujuan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola perekonomian melalui program pelatihan profesional maupun pendidikan di Prancis selama beberapa tahun. Program tersebut kemudian diperbarui kembali dalam Nouméa Accord dan berganti nama menjadi “*Cadres avenir*” atau manajer masa depan dengan program pelatihan dan pendidikan yang lebih spesifik dalam berbagai bidang profesi.³⁶

Sebuah laporan oleh Komisaris Tinggi pada bulan Juni 2010 mencatat bahwa pada tanggal 31 Desember 2009 terdapat 1058 peserta pelatihan yang di antaranya adalah 69% orang Kanak dan 700 orang telah dipulangkan ke Kaledonia Baru serta terdapat 490 orang Kanak yang telah dipekerjakan, sementara itu sekitar 30% sisanya adalah orang non-Kanak.³⁷ Adanya orang non-Kanak yang diikutsertakan menandai adanya pergeseran dari tujuan awal program yang difokuskan untuk pengembangan orang Kanak.³⁸ Kemudian tidak ada kejelasan penempatan kerja bagi beberapa orang yang telah dipulangkan dari pelatihan.

Sebuah laporan dari surat kabar *Nouvelle Calédoniennes* tanggal 10 Agustus 2009 menyatakan bahwa pada saat itu program tersebut telah melatih sebanyak 41 insinyur, empat pilot, tiga dokter dan dua arsitek dan angka tersebut dianggap sebagai hasil *output* yang rendah dari “investasi” program tersebut.

Berdasarkan laporan Anaya (2011) pada tahun 2011 tidak ada pengacara, hakim, dosen perguruan tinggi, kepala kepolisian ataupun dokter Kanak dan hanya ada enam bidan Kanak yang terdaftar dalam sistem kesehatan Negara dari total 300 bidan di Kaledonia Baru. Salah satu pemimpin Kanak menyatakan bahwa pada tahun 2009 administrasi pemerintahan di Provinsi Utara dan Kepulauan yang dihuni mayoritas Kanak masih mencakup sejumlah besar pejabat, guru dan penasihat Prancis dan Caldoche (penduduk keturunan Eropa di Kaledonia Baru). Hanya ada 57 orang Kanak di administrasi wilayah tingkat menengah atau atas dari total 3660 pegawai negeri sipil.

Upaya dalam melindungi dan mengembangkan tenaga kerja lokal berdasarkan Nouméa Accord dinilai lamban. Kemudian sebuah rancangan undang-undang mengenai pekerjaan preferensial di dinas sipil setempat yang dirancang oleh Avenir Ensemble yang dibawah pemerintah Kaledonia Baru ditolak oleh Dewan Negara Prancis. Rancangan berikutnya yang bertujuan untuk melindungi akses penduduk lokal yang telah tinggal 10 tahun di Kaledonia Baru terhambat oleh abstensi FLNKS pada bulan Desember 2009.³⁹ Pada bulan Juli 2010 sebuah teks dalam rancangan undang-undang sebelumnya disetujui dengan beberapa pertimbangan terhadap kriteria pekerja yang berlaku untuk penduduk setempat.

Akhirnya pada bulan Desember 2010 Komite Penandatanganan merencanakan adanya pertimbangan lebih lanjut dari permasalahan tersebut.⁴⁰

Sementara itu di bidang pendidikan masih terdapat masalah dalam transfer kekuasaan Prancis ke Kaledonia Baru. Nouméa Accord mengatur tentang pemindahan tanggung jawab sekolah dasar dalam masa awal Pemerintahan Kaledonia Baru yang baru dibentuk yaitu dari tahun 1999 hingga 2004 yang telah diselesaikan dengan baik. Adapun untuk sekolah menengah diselesaikan dalam termin kedua di tahun 2004-2009 dan termin ketiga di tahun 2009–2014.

Masalah pendidikan di Kaledonia Baru cukup rumit di mana pada periode “*les événements*” tahun 1980-an, sistem pendidikan Prancis menjadi masalah yang besar dan akhirnya pendukung FLNKS mendirikan sekolah Kanak di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, Prancis memberikan solusi dengan mengubah kurikulum sekolah dasar yang mencakup mata pelajaran sejarah lokal dan pendirian Akademi Bahasa Kanak yang didirikan pada tahun 2007.⁴¹

Pada akhir termin kedua di tahun 2009, masyarakat pro-loyalis khawatir bahwa transfer pendidikan menengah ke Kaledonia Baru akan menurunkan standar pendidikan yang sebelumnya memakai sistem pendidikan Prancis. Meskipun sistem pendidikan lokal Prancis dapat diakses secara universal, pada kenyataannya di Kaledonia Baru sistem tersebut masih dua tingkat. Anak-anak Kanak bersekolah di sekolah dasar lokal di provinsi namun harus menempuh jarak yang jauh dan bahasa yang digunakan di sekolah adalah bahasa Prancis yang dianggap tidak menguntungkan oleh masyarakat adat. Sebagian besar dari 30% siswa yang

berhenti sekolah adalah orang Kanak⁴² karena mereka kurang mampu mengikuti sistem pendidikan yang didominasi oleh orang non-Kanak.

Pada ujian *baccalauréat* atau setara tingkat Strata-1 tahun 2009 Kanak hanya mewakili 23% kandidat, sementara 69% kandidat adalah orang Caldoche.⁴³ Sensus tahun 2009 menunjukkan di tahun tersebut terdapat 54,1% orang Caldoche memiliki gelar sarjana, 12,5% orang Kanak dan 14,2% orang Wallis. Gelar tersier (master) dimiliki oleh 20.233 orang Caldoche, tetapi hanya 2.214 orang Kanak dan 470 orang Wallis memiliki gelar di tingkat pendidikan yang sama.⁴⁴

Namun demikian, sistem pendidikan di Kaledonia Baru tetap menggunakan sistem pendidikan yang sama dengan Prancis dengan penyesuaian yang terkait dengan status dan pelatihan guru sekolah dasar, kompetensi lokal, konten pendidikan yang diintegrasikan dengan kekhasan budaya lokal, sejarah dan geografis wilayah serta kalender akademik. Kaledonia Baru dan Wallis Futuna adalah satu-satunya wilayah bagian Prancis yang menyesuaikan libur panjang dengan musim panas yang terjadi wilayah Samudera Pasifik yaitu pada bulan Desember hingga Maret, sehingga tahun ajaran di Kaledonia Baru berlangsung dari pertengahan bulan Februari hingga pertengahan bulan Desember.⁴⁵

Peningkatan kompetensi lokal melalui program pelatihan dan pendidikan yang berkualitas menjadi salah satu hal yang diatur dalam Nouméa Accord. Hal tersebut merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kaledonia Baru dan meminimalisir konflik antar penduduk yang disebabkan oleh persaingan kerja yang sebelumnya menjadikan masyarakat pribumi minoritas di wilayah mereka.

4.2.3 Dampak di Bidang Ekonomi

a. Mata Uang

Mata uang adalah salah satu hal yang tidak dapat ditransfer ke Kaledonia Baru dan akan tetap berada dalam wewenang Prancis, kecuali jika wilayah tersebut memutuskan untuk merdeka dalam referendum kemerdekaan 2018. Namun, Nouméa Accord dalam pasal 1.5 mengenai Identitas Kanak memberikan wewenang kepada Kaledonia Baru dalam hal desain grafis uang kertas, bendera, moto, dan lagu kebangsaan Kaledonia Baru sebagai tanda identitas yang disepakati bersama untuk mengekspresikan identitas Kanak. Berikut adalah gambar mata uang yang berlaku di Kaledonia Baru dengan desain yang menggambarkan identitas Kanak.



Gambar 4.2.2.2 CFP10.000 (Sumber: commons.wikimedia.org)

Terdapat kekhasan peraturan yang diberikan oleh Prancis dan hanya berlaku di Kaledonia Baru. Mata uang yang berlaku adalah Franc Pasifik Prancis (*Comptoirs Français du Pacifique*-CFP/XPF) yang dipatok EUR 1= XPF 119.332, sedangkan fluktuasi nilai tukar Euro terhadap USD (USD 1 = XPF 97,59). Untuk melindungi ekonomi lokal, maka peredaran barang, jasa, tenaga kerja, dan modal usaha tunduk pada ketentuan setempat. Sesuai Undang-undang Organik no. 99-209/

1999, pemerintah Kaledonia Baru berwenang mengatur pajak dan bea impor. Kaledonia Baru tidak terikat secara langsung dengan rezim perdagangan dan bea cukai WTO maupun Uni Eropa, namun dapat mengikuti ketentuan yang sama, seperti misalnya peraturan sanitasi yang mengikuti Prancis dan Uni Eropa.⁴⁶

b. Industri Pertambangan dan Pembagian Hasil

Prancis adalah kontributor terbesar untuk Kaledonia Baru. Pada tahun 2007 Prancis memberikan kontribusi sebesar CFP121.5 miliar atau sekitar €1 miliar. Nikel sejauh ini merupakan sumber pendapatan tunggal terbesar melalui ekspor nikel yang diperkirakan bernilai CFP177 miliar pada tahun 2007. Di tahun 1998 hingga 2006 saat harga nikel tinggi, ekspor nikel berkontribusi sekitar seperempat dari pertumbuhan ekonomi Kaledonia Baru. Namun sebagian besar keuntungan tersebut digunakan untuk kepentingan Prancis. Sementara itu, pendanaan utama dan upaya investasi di Kaledonia Baru lebih dipusatkan untuk memperluas sektor pertambangan nikel di mana pada tahun 2012 unit penghasil nikel tunggal masih dari pabrik di Doniambo yang berusia 150 tahun yang dikelola oleh SLN (Perusahaan *Société Le Nickel*) di Provinsi Selatan. Di Provinsi Utara sendiri sudah banyak perencanaan mengenai pengembangan produksi nikel, namun proyek-proyek tersebut masih terhambat sebagai akibat dari krisis keuangan global.⁴⁷

Namun demikian, Prancis memastikan adanya pembagian keuntungan dari produksi nikel kepada Kaledonia Baru meskipun sejak tahun 1983 Negara Prancis memegang 70% saham SLN yang dimiliki oleh perusahaan umum ERAP (*Entreprise de recherches et d'activités pétrolières*) dan 30% dimiliki oleh Elf Aquitaine dan Imétal yang keduanya juga merupakan perusahaan Prancis dan di

akhir tahun 1990-an kepemilikan saham Negara Prancis meningkat menjadi 85% oleh Eramet (*Entreprise de recherches et d'activités métallurgiques*). Namun, meskipun saat ini kepemilikan saham Negara Prancis di SNL telah berkurang, Pembagian keuntungan SNL sebagian besar tetap kembali kepada Prancis.⁴⁸

Dominasi tersebut kemudian menjadi masalah bagi kelompok pro-kemerdekaan. Sesuai dengan Pasal 3.1.1 Nouméa Accord memberikan pemerintah Kaledonia Baru wewenang atas eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), oleh karena itu FLNKS berusaha mendapatkan 51% saham untuk Kaledonia Baru di SNL.⁴⁹ Saat ini perusahaan Eramet tetap menjadi pemegang saham terbesar di SNL sejumlah 56% meskipun jumlahnya tidak sebesar pada tahun 1990-an. Berdasarkan Undang-undang Organik tahun 1999, Kaledonia Baru kini memiliki 34% saham di SNL melalui perusahaan STCPI (*Société Territoriale Calédonienne de Participations Industrielles*). Ketika STCPI didirikan pada tahun 1999, perusahaan tersebut mengakuisisi 30% saham SNL dan 5,1% saham dari Eramet. Secara substansial, jumlah tersebut masih kurang dari 51% sebagaimana tuntutan awal.⁵⁰ Namun demikian, perubahan kepemilikan saham tersebut menguntungkan bagi Kaledonia Baru. Saat adanya ledakan permintaan nikel di tahun 2007 dan 2008, SNL membayar lebih dari CFP20 miliar sebagai pajak dan CFP2,3 miliar sebagai dividen kepada pemerintah Kaledonia Baru. SNL mengklaim telah menghabiskan senilai CFP25 miliar dalam pembayaran lokal, dan CFP663 juta untuk pelatihan dan kondisi kerja di Kaledonia Baru. Selain itu, SNL menghabiskan CFP35 miliar untuk memperluas kapasitas Doniambo menjadi 75.000 ton.⁵¹

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran bagi peneliti selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi lahirnya Nouméa Accord 1998 di Kaledonia Baru. Ketiga faktor tersebut adalah faktor politik, faktor sosial budaya dan faktor ekonomi. Adanya negosiasi politik antara partai pro-kemerdekaan, partai loyalis Prancis dan pemerintah Prancis serta referendum persetujuan mengenai Perjanjian Kaledonia Baru menjadi faktor politik dilahirkan dan diterapkannya Nouméa Accord 1998. Jika dilihat dari faktor sosial budaya, Nouméa Accord dilahirkan sebagai kebijakan terhadap hak-hak ketenagakerjaan yang menyangkut kontrol imigrasi dan penyelesaian konflik antar penduduk serta pengakuan identitas Kanak. Kemudian masalah utama perekonomian terkait *rebalancing* ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam di Kaledonia Baru menjadi faktor ekonomi dilahirkan dan diimplementasikannya Nouméa Accord 1998 di Kaledonia Baru.

Implementasi Nouméa Accord 1998 di Kaledonia Baru memberikan dampak pada bidang politik, sosial budaya dan ekonomi di wilayah tersebut. Sebagai dampak di bidang politik, Nouméa Accord menetapkan status *sui generis* atau hak pemerintahan sendiri dengan transfer kekuasaan dari Prancis ke Kaledonia Baru dan pembagian wilayah di Kaledonia Baru. Selain itu, terdapat batasan

pemilih dalam referendum kemerdekaan untuk melindungi hak Kanak dan pelaksanaan referendum kemerdekaan 2018 sebagai realisasi dari janji pemerintah Prancis dalam Nouméa Accord dengan hasil Kaledonia Baru tetap menjadi bagian dari Prancis hingga keputusan dari pelaksanaan referendum kemerdekaan berikutnya.

Adapun dampak di bidang sosial budaya adalah kebijakan imigrasi oleh pemerintah Prancis dengan memperhatikan hak ketenagakerjaan lokal, pengakuan identitas Kanak melalui simbol-simbol kenegaraan, dan adanya program pelatihan, kepegawaian serta peraturan sistem pendidikan guna mengembangkan potensi sumber daya manusia di Kaledonia Baru khususnya kaum pribumi Kanak.

Selanjutnya dampak di bidang ekonomi adalah mata uang yang berlaku di Kaledonia Baru yang diatur oleh Prancis untuk melindungi perekonomian di wilayah tersebut serta kebijakan dalam industri pertambangan di Kaledonia Baru dan sistem pembagian hasil dari industri tersebut.

5.2 Saran

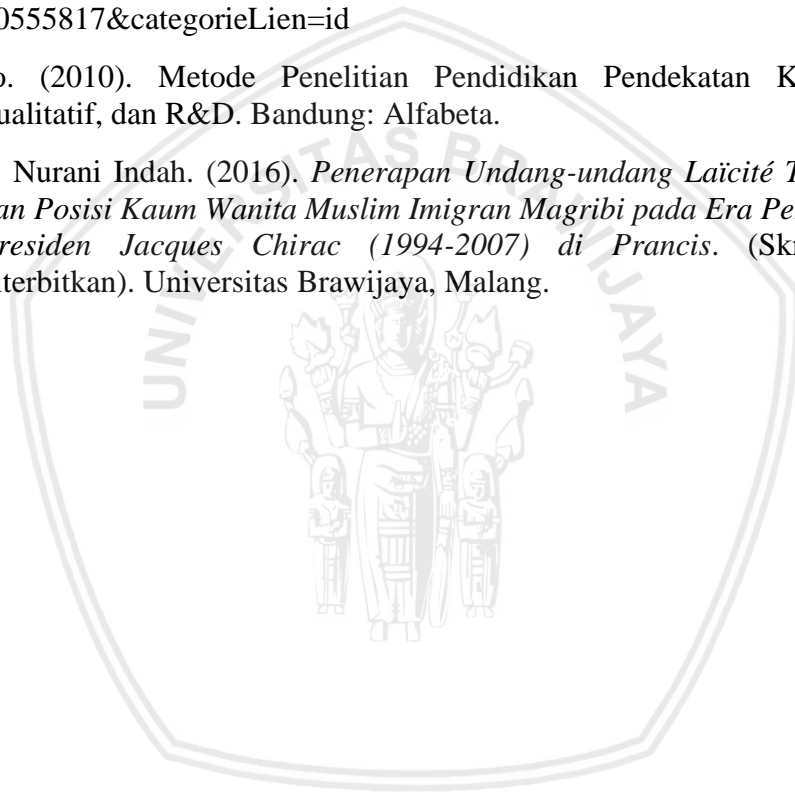
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hasil referendum kemerdekaan 2018 yang menetapkan Kaledonia Baru tetap menjadi bagian dari Prancis, penulis menyarankan peneliti selanjutnya untuk meneliti faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat pro-loyalis mendukung wilayah tersebut untuk tetap menjadi bagian dari Prancis dan peran partai pro-loyalis dalam memenangkan suara di referendum kemerdekaan Kaledonia Baru 2018.



DAFTAR PUSTAKA

- Anaya, J. (2011). *Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous people*. United Nations. Diakses pada 3 November 2019, dari <http://unsr.jamesanaya.org/docs/annual/2011-hrc-annual-report-a-hrc-18-35-en.pdf>
- Anonim. (1998, 8 April). En Nouvelle-Calédonie Le RPCR appelle à une manifestation contre le FLNKS le 16 avril à Nouméa. *Le Monde*. Diakses dari https://www.lemonde.fr/archives/article/1988/04/08/en-nouvelle-caledonie-le-rpcr-appellee-a-une-manifestation-contre-le-flnks-le-16-avril-a-noumea_4065795_1819218.html
- En Nouvelle-Calédonie Le RPCR appelle à une manifestation contre le FLNKS le 16 avril à Nouméa. (1988, 8 April). *Le Monde*. Diakses pada 22 September 2019, dari https://www.lemonde.fr/archives/article/1988/04/08/en-nouvelle-caledonie-le-rpcr-appelle-a-une-manifestation-contre-le-flnks-le-16-avril-a-noumea_4065795_1819218.html
- Gendarmerie. (n.d.). *Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales*. Diakses pada 21 Oktober 2019, dari <https://www.cnrtl.fr/definition/gendarmerie>
- Gunawan. I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Implementasi. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Diakses pada 24 September 2019, dari <https://kbbi.web.id/implementasi>.
- Kodhi, S.A. (1989). *Referendum dalam Negara Demokrasi Pancasila: Suatu Tinjauan Kefilsafatan dan Yuridis Konstitusional*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Koentjaraningrat. (1993). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. (2008). *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Leblic, I. (2018). La Kanaky Nouvelle-Calédonie a rendez-vous avec l'Histoire. *Journal de la Société des Océanistes*. Diakses pada 22 September 2019, dari <https://www.cairn.info/revue-journal-de-la-societe-des-oceanistes-2018-2-page-529.htm#>
- Les jeunes du Grand Nord préparent l'avenir. (2009, 10 Agustus). *Les Nouvelles Calédoniennes*. Diakses pada 3 November 2019, dari <https://www.lnc.nc/article/nord/les-jeunes-du-grand-nord-preparent-l-avenir>
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

- Nuttall, C.M. (2016). *Conflict, Colonisation and Reconciliation in New Caledonia*. (Master's thesis). Diakses dari <https://openresearch-repository.anu.edu.au>
- Rachmawati, H. D. (2016). *Mandiri: Sejarah Indonesia untuk SMA/MA Kelas X*. Jakarta: Erlangga.
- Raco, J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Republik Prancis. (1998). *Accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998*. Diakses pada 24 September 2019, dari <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000555817&categorieLien=id>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wardani, Nurani Indah. (2016). *Penerapan Undang-undang Laïcité Tahun 2004 dan Posisi Kaum Wanita Muslim Imigran Magribi pada Era Pemerintahan Presiden Jacques Chirac (1994-2007) di Prancis*. (Skripsi tidak diterbitkan). Universitas Brawijaya, Malang.



CATATAN

1. KJRI Nouméa. (2014). *Hubungan Bilateral RI-Kaledonia Baru*. Diakses pada 30 Oktober 2019, dari <https://kemlu.go.id/noumea/id/read/kaledonia-baru/869/etc-menu>
2. Legifrance (n.d.). *Accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998*. Diakses pada 15 Oktober 2019, dari <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000555817&categorieLien=id>
3. MacLellan, N. (1999). The Noumea Accord and Decolonisation in New Caledonia. *The Journal of Pacific History*. Diakses pada 15 Oktober 2019, dari https://www.jstor.org/stable/25169446?seq=1#page_scan_tab_contents. Para 1.
4. MacLellan, N. (1999). The Noumea Accord and Decolonisation in New Caledonia. *The Journal of Pacific History*. Diakses pada 15 Oktober 2019, dari https://www.jstor.org/stable/25169446?seq=1#page_scan_tab_contents. Para 4
5. Legifrance (n.d.). *Décision du 9 novembre 1998 proclamant les résultats de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie du dimanche 8 novembre 1998*. Diakses pada 15 Oktober 2019, dari <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000574796&dateTexte=>
6. Perang antar klan sudah ada sebelum kedatangan Prancis di Kaledonia Baru. Kemudian para misionaris Barat datang dan meningkatkan konflik karena memberlakukan hukum gereja yang tidak sesuai dengan hukum adat di Kaledonia Baru. Di saat yang sama, militer Prancis datang dan menerapkan kode *indigénat* atau undang-undang tentang praktik kolonialisme oleh Prancis. Hal tersebut kemudian memicu perlawanan Kanak. (Leblic, I. (2018). *La Kanaky Nouvelle-Calédonie a rendez-vous avec l'Histoire. Journal de la Société des Océanistes*. Diakses pada 15 Oktober 2019, dari <https://www.cairn.info/revue-journal-de-la-societe-des-oceanistes-2018-2-page-529.htm#>)
7. Connell, John. (1987). *New Caledonia or Kanaky ? The political history of a French Colony*. (Abstrak). ANU Press. Diakses pada 15 Oktober 2019, dari http://pacificinstitute.anu.edu.au/sites/default/files/resources-links/PRM_16.pdf
8. Natalia, Desca Lidya. (2011, 3 Maret). 115 Tahun Mereka di Kaledonia Baru. *Kompas*. Diakses pada 9 Desember 2019, dari <https://nasional.kompas.com/read/2011/03/03/00555769/115.Tahun.Mereka.di.New.Caledonia>
9. Fisher, D. (2013). *France in The South Pacific*. ANU Press. Diakses pada 25 Oktober 2019, dari <https://www.jstor.org/stable/j.ctt31ngqm.11>. P.106
10. International Work Group for Indigenous Affairs. (2001). *Racism Against Indigenous Peoples*. Diakses pada 25 Oktober 2019, dari

- https://books.google.co.id/books?id=f7EPoTyUvfkC&dq=matignon+accord+about+migration&hl=fr&source=gbs_navlinks_s. P. 115
11. Leblic, I. (2018). La Kanaky Nouvelle-Calédonie a rendez-vous avec l'Histoire. *Journal de la Société des Océanistes*. Diakses pada 15 Oktober 2019, dari <https://www.cairn.info/revue-journal-de-la-societe-des-oceanistes-2018-2-page-529.htm#>
 12. Nuttall, C.M. (2016). *Conflict, Colonisation and Reconciliation in New Caledonia*. (Master's thesis). Diakses pada 15 Oktober 2019, dari <https://openresearch-repository.anu.edu.au>. P. 190
 13. Waddell, E. (2008). *Jean-Marie Tjibaou, Kanak Witness to the World: An Intellectual Biography*. University of Hawai'i Press. Diakses pada 16 Oktober 2019, dari <http://www.jstor.org/stable/j.ctt6wr099>
 14. Nuttall, C.M. (2016). *Conflict, Colonisation and Reconciliation in New Caledonia*. (Master's thesis). Diakses pada 15 Oktober 2019, dari <https://openresearch-repository.anu.edu.au>. P. 186
 15. Leblic, I. (2018). La Kanaky Nouvelle-Calédonie a rendez-vous avec l'Histoire. *Journal de la Société des Océanistes*. Diakses pada 15 Oktober 2019, dari <https://www.cairn.info/revue-journal-de-la-societe-des-oceanistes-2018-2-page-529.htm#>
 16. Nuttall, C.M. (2016). *Conflict, Colonisation and Reconciliation in New Caledonia*. (Master's thesis). Diakses pada 15 Oktober 2019, dari <https://openresearch-repository.anu.edu.au>. P. 192
 17. Nuttall, C.M. (2016). *Conflict, Colonisation and Reconciliation in New Caledonia*. (Master's thesis). Diakses pada 15 Oktober 2019, dari <https://openresearch-repository.anu.edu.au>. P. 190
 18. Vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie. (n.d.). *Des Accords de Matignon à l'Accord de Nouméa (1988-1998)*. Diakses pada 16 Oktober 2019, dari <https://www.ac-noumea.nc/spip.php?article636>
 19. Fisher, D. (2013). *France in The South Pacific*. ANU Press. Diakses pada 25 Oktober 2019, dari <https://www.jstor.org/stable/j.ctt31ngqm.11>. P.106
 20. Fisher, D. (2013). *France in The South Pacific*. ANU Press. Diakses pada 25 Oktober 2019, dari <https://www.jstor.org/stable/j.ctt31ngqm.11>. P.124
 21. Nouvelle Calédonie. (2018). *GIP Cadres avenir*. Diakses pada 15 Oktober 2019, dari <http://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Economie-emploi-et-formation/GIP-Cadres-avenir>
 22. Angleviel, F. (2003). Restoring the Economic Balance: The Nickel Stakes in New Caledonia. *The New Pacific Review*. Diakses pada 15 Oktober 2019, dari https://openresearchrepository.anu.edu.au/bitstream/1885/128844/1/New_Pacific_Review_02_01.pdf P. 159
 23. Société minière du Sud Pacifique : <https://smsp.nc/lhistorique/> (Diakses pada 15 Oktober 2019)
 24. l'Intérieur, Ministère de. (n.d.). *La liste spéciale pour le référendum (LESC) / Les électeurs / Référendum 2018 / Politiques publiques / Accueil - Les services de l'État en Nouvelle-Calédonie*. Diakses pada 3 November 2019, dari www.nouvelle-caledonie.gouv.fr

25. Lecas, Marion. (2018, 3 November). Référendum en Nouvelle-Calédonie: pourquoi les «Zoreille» n'ont pas le droit de voter. *Slate*. Diakses pada 3 November 2019, dari <http://www.slate.fr/story/169377/referendum-nouvelle-caledonie-liste-electorale-exclu-zoreille-caldochekanak>
26. Legifrance (n.d.). *Accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998*. Diakses pada 15 Oktober 2019, dari <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000555817&categorieLien=id>
27. Nuttall, C.M. (2016). *Conflict, Colonisation and Reconciliation in New Caledonia*. (Master's thesis). Diakses pada 15 Oktober 2019, dari <https://openresearch-repository.anu.edu.au>. P. 163
28. Anonim. (2018, 19 Maret). Le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie aura lieu le 4 novembre. *Le Monde*. Diakses pada 3 November 2019, dari https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/03/19/le-referendum-sur-l-independance-de-la-nouvelle-caledonie-aura-lieu-le-4-novembre_5272994_3224.html
29. Loi organique du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie : <https://www.vie-publique.fr/loi/20795-organisation-de-la-consultation-sur-laccession-la-pleine-souverainete> (Diakses pada 3 November 2019)
30. Wéry, Claudine. (2018, 27 Maret). Nouvelle-Calédonie : la question du référendum en débat. *Le Monde*. Diakses pada 2 November 2019, dari https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/03/27/nouvelle-caledonie-la-question-du-referendum-en-debat_5276987_823448.html
31. Anonim. (2018, 28 Maret). Nouvelle-Calédonie : un compromis a été trouvé sur la question posée lors du référendum d'indépendance. *Le Monde*. Diakses pada 2 November 2019, dari https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/03/28/nouvelle-caledonie-un-compromis-a-ete-trouve-sur-la-question-posee-lors-du-referendum-d-independance_5277257_823448.html
32. Les Résultats du Référendum 2018: <https://www.elections-nc.fr/elections-2018-2019/referendum-2018/les-resultats> (Diakses pada 2 November 2019)
33. Goapana, Nadine. (2019, 1 Juli). A quand le prochain référendum : avant ou après juillet 2020 ?. *France Info*. Diakses pada 2 November 2019, dari <https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/quand-prochain-referendum-apres-juillet-2020-726530.html>
34. Fisher, D. (2013). *France in The South Pacific*. ANU Press. Diakses pada 25 Oktober 2019, dari <https://www.jstor.org/stable/j.ctt31ngqm.11> P. 122
35. P. Frédière, S. Amiotte, X. Heyraud, Y. Mainguet,. (2010, 19 Juli). Le pays aux deux drapeaux (Vidéo), *Les Nouvelles Calédoniennes*. Diakses pada 3 November 2019, dari <https://www.lnc.nc/pays/politique/229023-le-pays-aux-deux-drapeaux.html>
36. Programme Cadres Avenir: <https://gip-cadres-avenir.nc/> (Diakses pada 2 November 2019)
37. Documentation Relatives au Droit de l'Homme : <https://www.un.org/press/fr/1999/19991108.agshc439.html> (Diakses pada 3 November 2019)

38. Fisher, D. (2013). *France in The South Pacific*. ANU Press. Diakses pada 25 Oktober 2019, dari <https://www.jstor.org/stable/j.ctt31ngqm.11> P. 141
39. Fisher, D. (2013). *France in The South Pacific*. ANU Press. Diakses pada 3 November 2019, dari <https://www.jstor.org/stable/j.ctt31ngqm.11> P. 141
40. Fisher, D. (2013). *France in The South Pacific*. ANU Press. Diakses pada 3 November 2019, dari <https://www.jstor.org/stable/j.ctt31ngqm.11> P. 142
41. Relevé de conclusion. (2010). Diakses pada 3 November 2019, dari <http://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/content/download/4922/37992/file/08%20relev%C3%A9%20de%20conclusions%20du%20VIII%C3%A8me%20comit%C3%A9%20des%20signataires%20-%202024%20juin%202010.pdf> No. 5
42. Fisher, D. (2013). *France in The South Pacific*. ANU Press. Diakses pada 25 Oktober 2019, dari <https://www.jstor.org/stable/j.ctt31ngqm.11> P. 142
43. Fisher, D. (2013). *France in The South Pacific*. ANU Press. Diakses pada 25 Oktober 2019, dari <https://www.jstor.org/stable/j.ctt31ngqm.11> P. 143
44. Anonim. (2010, 22 Maret). De lécole coloniale à l'école d'émancipation. *Nouvelles Calédoniennes*. Diakses pada 3 November 2019, dari <https://www.lnc.nc/article/politique/de-l-ecole-coloniale-a-l-ecole-d-emanicipation>
45. Fisher, D. (2013). *France in The South Pacific*. ANU Press. Diakses pada 3 November 2019, dari <https://www.jstor.org/stable/j.ctt31ngqm.11> P. 142
46. KJRI Nouméa. (2014). *Hubungan Bilateral RI-Kaledonia Baru*. Diakses pada 30 Oktober 2019, dari <https://kemlu.go.id/noumea/id/read/kaledonia-baru/869/etc-menu>
47. Fisher, D. (2013). *France in The South Pacific*. ANU Press. Diakses pada 2 November 2019, dari <https://www.jstor.org/stable/j.ctt31ngqm.11> P. 125
48. Fisher, D. (2013). *France in The South Pacific*. ANU Press. Diakses pada 2 November 2019, dari <https://www.jstor.org/stable/j.ctt31ngqm.11> P. 125
49. Fisher, D. (2013). *France in The South Pacific*. ANU Press. Diakses pada 3 November 2019, dari <https://www.jstor.org/stable/j.ctt31ngqm.11> P. 127
50. Fisher, D. (2013). *France in The South Pacific*. ANU Press. Diakses pada 3 November 2019, dari <https://www.jstor.org/stable/j.ctt31ngqm.11> P. 127
51. Fisher, D. (2013). *France in The South Pacific*. ANU Press. Diakses pada 3 November 2019, dari <https://www.jstor.org/stable/j.ctt31ngqm.11> P. 128

Lampiran 1: Nouméa Accord

Le 13 décembre 2019

JORF n°121 du 27 mai 1998

Accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998

NOR: PRMX9801273X

Préambule

1. Lorsque la France prend possession de la Grande Terre, que James Cook avait dénommée « Nouvelle-Calédonie », le 24 septembre 1853, elle s'approprie un territoire selon les conditions du droit international alors reconnu par les nations d'Europe et d'Amérique, elle n'établit pas des relations de droit avec la population autochtone. Les traités passés, au cours de l'année 1854 et les années suivantes, avec les autorités coutumières, ne constituent pas des accords équilibrés mais, de fait, des actes unilatéraux.

Or, ce territoire n'était pas vide.

La Grande Terre et les îles étaient habitées par des hommes et des femmes qui ont été dénommés kanak. Ils avaient développé une civilisation propre, avec ses traditions, ses langues, la coutume qui organisait le champ social et politique. Leur culture et leur imaginaire s'exprimaient dans diverses formes de création.

L'identité kanak était fondée sur un lien particulier à la terre. Chaque individu, chaque clan se définissait par un rapport spécifique avec une vallée, une colline, la mer, une embouchure de rivière, et gardait la mémoire de l'accueil d'autres familles. Les noms que la tradition donnait à chaque élément du paysage, les tabous marquant certains d'entre eux, les chemins coutumiers structuraient l'espace et les échanges.

2. La colonisation de la Nouvelle-Calédonie s'est inscrite dans un vaste mouvement historique où les pays d'Europe ont imposé leur domination au reste du monde.

Des hommes et des femmes sont venus en grand nombre, aux xix^e et xx^e siècles, convaincus d'apporter le progrès, animés par leur foi religieuse, venus contre leur gré ou cherchant une seconde chance en Nouvelle-Calédonie. Ils se sont installés et y ont fait souche. Ils ont apporté avec eux leurs idéaux, leurs connaissances, leurs espoirs, leurs ambitions, leurs illusions et leurs contradictions.

Parmi eux certains, notamment des hommes de culture, des prêtres ou des pasteurs, des médecins et des ingénieurs, des administrateurs, des militaires, des responsables politiques ont porté sur le peuple d'origine un regard différent, marqué par une plus grande compréhension ou une réelle compassion.

Les nouvelles populations sur le territoire ont participé, dans des conditions souvent difficiles, en apportant des connaissances scientifiques et techniques, à la mise en valeur minière ou agricole et, avec l'aide de l'Etat, à l'aménagement de la Nouvelle-Calédonie. Leur détermination et leur inventivité ont permis une mise en valeur et jeté les bases du développement.

La relation de la Nouvelle-Calédonie avec la métropole lointaine est demeurée longtemps marquée par la dépendance coloniale, un lien univoque, un refus de reconnaître les spécificités, dont les populations nouvelles ont aussi souffert dans leurs aspirations.

3. Le moment est venu de reconnaître les ombres de la période coloniale, même si elle ne fut pas dépourvue de lumière.

Le choc de la colonisation a constitué un traumatisme durable pour la population d'origine.

Des clans ont été privés de leur nom en même temps que de leur terre. Une importante colonisation foncière a entraîné des déplacements considérables de population, dans lesquels des clans kanak ont vu leurs moyens de subsistance réduits et leurs lieux de mémoire perdus. Cette dépossession a conduit à une perte des repères identitaires.

L'organisation sociale kanak, même si elle a été reconnue dans ses principes, s'en est trouvée bouleversée. Les mouvements de population l'ont déstructurée, la méconnaissance ou des stratégies de pouvoir ont conduit trop souvent à nier les autorités légitimes et à mettre en place des autorités dépourvues de légitimité selon la coutume, ce qui a accentué le traumatisme identitaire.

Simultanément, le patrimoine artistique kanak était nié ou pillé.

A cette négation des éléments fondamentaux de l'identité kanak se sont ajoutées des limitations aux libertés publiques et une absence de droits politiques, alors même que les kanak avaient payé un lourd tribut à la défense de la France, notamment lors de la Première Guerre mondiale.

Les kanak ont été repoussés aux marges géographiques, économiques et politiques de leur propre pays, ce qui ne pouvait, chez un peuple fier et non dépourvu de traditions guerrières, que provoquer des révoltes, lesquelles ont suscité des répressions violentes, aggravant les ressentiments et les incompréhensions.

La colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple kanak qu'elle a privé de son identité. Des hommes et des femmes ont perdu dans cette confrontation leur vie ou leurs raisons de vivre. De grandes souffrances en sont résultées. Il convient de faire mémoire de ces moments difficiles, de reconnaître les fautes, de restituer au

peuple kanak son identité confisquée, ce qui équivaut pour lui à une reconnaissance de sa souveraineté, préalable à la fondation d'une nouvelle souveraineté, partagée dans un destin commun.

4. La décolonisation est le moyen de refonder un lien social durable entre les communautés qui vivent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, en permettant au peuple kanak d'établir avec la France des relations nouvelles correspondant aux réalités de notre temps.

Les communautés qui vivent sur le territoire ont acquis par leur participation à l'édification de la Nouvelle-Calédonie une légitimité à y vivre et à continuer de contribuer à son développement. Elles sont indispensables à son équilibre social et au fonctionnement de son économie et de ses institutions sociales. Si l'accession des kanak aux responsabilités demeure insuffisante et doit être accrue par des mesures volontaristes, il n'en reste pas moins que la participation des autres communautés à la vie du territoire lui est essentielle.

Il est aujourd'hui nécessaire de poser les bases d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, permettant au peuple d'origine de constituer avec les hommes et les femmes qui y vivent une communauté humaine affirmant son destin commun.

La taille de la Nouvelle-Calédonie et ses équilibres économiques et sociaux ne permettent pas d'ouvrir largement le marché du travail et justifient des mesures de protection de l'emploi local.

Les accords de Matignon signés en juin 1988 ont manifesté la volonté des habitants de Nouvelle-Calédonie de tourner la page de la violence et du mépris pour écrire ensemble des pages de paix, de solidarité et de prospérité.

Dix ans plus tard, il convient d'ouvrir une nouvelle étape, marquée par la pleine reconnaissance de l'identité kanak, préalable à la refondation d'un contrat social entre toutes les communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie, et par un partage de souveraineté avec la France, sur la voie de la pleine souveraineté.

Le passé a été le temps de la colonisation. Le présent est le temps du partage, par le rééquilibrage. L'avenir doit être le temps de l'identité, dans un destin commun.

La France est prête à accompagner la Nouvelle-Calédonie dans cette voie.

5. Les signataires des accords de Matignon ont donc décidé d'arrêter ensemble une solution négociée, de nature consensuelle, pour laquelle ils appelleront ensemble les habitants de Nouvelle-Calédonie à se prononcer.

Cette solution définit pour vingt années l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie et les modalités de son émancipation.

Sa mise en oeuvre suppose une loi constitutionnelle que le Gouvernement s'engage à préparer en vue de son adoption au Parlement.

La pleine reconnaissance de l'identité kanak conduit à préciser le statut coutumier

et ses liens avec le statut civil des personnes de droit commun, à prévoir la place des structures coutumières dans les institutions, notamment par l'établissement d'un Sénat coutumier, à protéger et valoriser le patrimoine culturel kanak, à mettre en place de nouveaux mécanismes juridiques et financiers pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre, tout en favorisant sa mise en valeur, et à adopter des symboles identitaires exprimant la place essentielle de l'identité kanak du pays dans la communauté de destin acceptée.

Les institutions de la Nouvelle-Calédonie traduiront la nouvelle étape vers la souveraineté : certaines des délibérations du Congrès du territoire auront valeur législative et un Exécutif élu les préparera et les mettra en oeuvre.

Au cours de cette période, des signes seront donnés de la reconnaissance progressive d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, celle-ci devant traduire la communauté de destin choisie et pouvant se transformer, après la fin de la période, en nationalité, s'il en était décidé ainsi.

Le corps électoral pour les élections aux assemblées locales propres à la Nouvelle-Calédonie sera restreint aux personnes établies depuis une certaine durée.

Afin de tenir compte de l'étroitesse du marché du travail, des dispositions seront définies pour favoriser l'accès à l'emploi local des personnes durablement établies en Nouvelle-Calédonie.

Le partage des compétences entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie signifiera la souveraineté partagée. Il sera progressif. Des compétences seront transférées dès la mise en oeuvre de la nouvelle organisation. D'autres le seront selon un calendrier défini, modulable par le Congrès, selon le principe d'auto-organisation. Les compétences transférées ne pourront revenir à l'Etat, ce qui traduira le principe d'irréversibilité de cette organisation.

La Nouvelle-Calédonie bénéficiera pendant toute la durée de mise en oeuvre de la nouvelle organisation de l'aide de l'Etat, en termes d'assistance technique et de formation et des financements nécessaires, pour l'exercice des compétences transférées et pour le développement économique et social.

Les engagements seront inscrits dans des programmes pluriannuels. La Nouvelle-Calédonie prendra part au capital ou au fonctionnement des principaux outils du développement dans lesquels l'Etat est partie prenante.

Au terme d'une période de vingt années, le transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, l'accès à un statut international de pleine responsabilité et l'organisation de la citoyenneté en nationalité seront proposés au vote des populations intéressées.

Leur approbation équivaldrait à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.

Document d'orientation

1. L'identité kanak

L'organisation politique et sociale de la Nouvelle-Calédonie doit mieux prendre en compte l'identité kanak.

1.1. Le statut civil particulier

Certains kanak ont le statut civil de droit commun sans l'avoir souhaité.

Le statut civil particulier est source d'insécurité juridique et ne permet pas de répondre de manière satisfaisante à certaines situations de la vie moderne.

En conséquence, les orientations suivantes sont retenues :

- le statut civil particulier s'appellera désormais « statut coutumier » ;
- toute personne pouvant relever du statut coutumier et qui y aurait renoncé, ou qui s'en serait trouvée privée à la suite d'une renonciation faite par ses ancêtres ou par mariage ou par toute autre cause (cas des enfants inscrits en métropole sur l'état civil) pourra le retrouver. La loi de révision constitutionnelle autorisera cette dérogation à l'article 75 de la Constitution ;
- les règles relatives au statut coutumier seront fixées par les institutions de la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions indiquées plus loin ;
- le statut coutumier distinguera les biens situés dans les « terres coutumières » (nouveau nom de la réserve), qui seront appropriés et dévolus en cas de succession selon les règles de la coutume et ceux situés en dehors des terres coutumières qui obéiront à des règles de droit commun.

1.2. Droit et structures coutumières

1.2.1. Le statut juridique du procès-verbal de palabre (dont le nom pourrait être modifié) doit être redéfini, pour lui donner une pleine force juridique, en fixant sa forme et en organisant une procédure d'appel permettant d'éviter toute contestation ultérieure. Le rôle de syndic des affaires coutumières, actuellement tenu par les gendarmes, sera exercé par un autre agent, par exemple de la commune ou de l'aire coutumière.

La forme du procès-verbal de palabre sera définie par le Congrès en accord avec les instances coutumières (voir plus bas). L'appel aura lieu devant le conseil d'aire et l'enregistrement se fera par le conseil d'aire ou la mairie.

1.2.2. Le rôle des aires coutumières sera valorisé, notamment en confiant aux conseils d'aires un rôle dans la clarification et l'interprétation des règles coutumières. Plus généralement, l'organisation spatiale de la Nouvelle-Calédonie devra mieux tenir compte de leur existence. En particulier les limites communales devraient pouvoir tenir compte des limites des aires.

1.2.3. Le mode de reconnaissance des autorités coutumières sera précisé pour garantir leur légitimité. Il sera défini par l'instance coutumière de la Nouvelle-Calédonie (voir plus bas). Notification en sera faite au représentant de l'Etat et à l'Exécutif de la Nouvelle-Calédonie qui ne pourront que l'enregistrer. Leur statut sera précisé.

1.2.4. Le rôle des autorités coutumières dans la prévention sociale et la médiation pénale sera reconnu. Ce dernier rôle sera prévu dans les textes applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de procédure pénale.

Les autorités coutumières pourront être associées à l'élaboration des décisions des assemblées locales, à l'initiative des assemblées de provinces ou des communes.

1.2.5. Le Conseil coutumier de la Nouvelle-Calédonie deviendra un « Sénat coutumier », composé de seize membres (deux par aire coutumière), obligatoirement consulté sur les sujets intéressant l'identité kanak.

1.3. Le patrimoine culturel

1.3.1. Les noms de lieux

Les noms kanak des lieux seront recensés et rétablis. Les sites sacrés selon la tradition kanak seront identifiés et juridiquement protégés, selon les règles applicables en matière de monuments historiques.

1.3.2. Les objets culturels

L'Etat favorisera le retour en Nouvelle-Calédonie d'objets culturels kanak qui se trouvent dans des musées ou des collections, en France métropolitaine ou dans d'autres pays. Les moyens juridiques dont dispose l'Etat pour la protection du patrimoine national seront mis en oeuvre à cette fin. Des conventions seront passées avec ces institutions pour le retour de ces objets ou leur mise en valeur.

1.3.3. Les langues

Les langues kanak sont, avec le français, des langues d'enseignement et de culture en Nouvelle-Calédonie. Leur place dans l'enseignement et les médias doit donc être accrue et faire l'objet d'une réflexion approfondie.

Une recherche scientifique et un enseignement universitaire sur les langues kanak doivent être organisés en Nouvelle-Calédonie. L'Institut national des langues et civilisations orientales y jouera un rôle essentiel. Pour que ces langues trouvent la place qui doit leur revenir dans l'enseignement primaire et secondaire, un effort important sera fait sur la formation des formateurs.

Une académie des langues kanak, établissement local dont le conseil d'administration sera composé de locuteurs désignés en accord avec les autorités coutumières, sera mise en place. Elle fixera leurs règles d'usage et leur évolution.

1.3.4. Le développement culturel

La culture kanak doit être valorisée dans les formations artistiques et dans les médias. Les droits des auteurs doivent être effectivement protégés.

1.3.5. Le Centre culturel Tjibaou

L'Etat s'engage à apporter durablement l'assistance technique et les financements nécessaires au Centre culturel Tjibaou pour lui permettre de tenir pleinement son

rôle de pôle de rayonnement de la culture kanak.

Sur l'ensemble de ces questions relatives au patrimoine culturel, l'Etat proposera à la Nouvelle-Calédonie de conclure un accord particulier.

1.4. La terre

L'identité de chaque Kanak se définit d'abord en référence à une terre.

Le rôle et les conditions de fonctionnement de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF) devront faire l'objet d'un bilan approfondi. Elle devra disposer des moyens suffisants pour intervenir dans les zones suburbaines. L'accompagnement des attributions de terre devra être accentué pour favoriser l'installation des attributaires et la mise en valeur.

Les terres coutumières doivent être cadastrées pour que les droits coutumiers sur une parcelle soient clairement identifiés. De nouveaux outils juridiques et financiers seront mis en place pour favoriser le développement sur les terres coutumières, dont le statut ne doit pas être un obstacle à la mise en valeur.

La réforme foncière sera poursuivie. Les terres coutumières seront constituées des réserves, des terres attribuées aux « groupements de droit particulier local » et des terres qui seront attribuées par l'ADRAF pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. Il n'y aura plus ainsi que les terres coutumières et les terres de droit commun. Des baux seront définis par le Congrès, en accord avec le Sénat coutumier, pour préciser les relations entre le propriétaire coutumier et l'exploitant sur les terres coutumières. Les juridictions statuant sur les litiges seront les juridictions de droit commun avec des assesseurs coutumiers.

Les domaines de l'Etat et du territoire doivent faire l'objet d'un examen dans la perspective d'attribuer ces espaces à d'autres collectivités ou à des propriétaires coutumiers ou privés, en vue de rétablir des droits ou de réaliser des aménagements d'intérêt général. La question de la zone maritime sera également examinée dans le même esprit.

1.5. Les symboles

Des signes identitaires du pays, nom, drapeau, hymne, devise, graphismes des billets de banque devront être recherchés en commun pour exprimer l'identité kanak et le futur partagé entre tous.

La loi constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie prévoira la possibilité de changer ce nom, par « loi du pays » adoptée à la majorité qualifiée (voir plus bas).

Une mention du nom du pays pourra être apposée sur les documents d'identité, comme signe de citoyenneté.

2. Les institutions

L'un des principes de l'accord politique est la reconnaissance d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. Celle-ci traduit la communauté de destin choisie et

s'organiserait, après la fin de la période d'application de l'accord, en nationalité, s'il en était décidé ainsi.

Pour cette période, la notion de citoyenneté fonde les restrictions apportées au corps électoral pour les élections aux institutions du pays et pour la consultation finale. Elle sera aussi une référence pour la mise au point des dispositions qui seront définies pour préserver l'emploi local.

La loi constitutionnelle le permettra.

2.1. Les assemblées

2.1.1. Les assemblées de province seront composées, respectivement pour les îles Loyauté, le Nord et le Sud, de sept, quinze et trente-deux membres, également membres du Congrès, ainsi que de sept, sept et huit membres supplémentaires, non membres du Congrès lors de la mise en place des institutions. Les assemblées de province pourront réduire, pour les mandats suivants, l'effectif des conseillers non-membres du Congrès.

2.1.2. Le mandat des membres du Congrès et des assemblées de province sera de cinq ans.

2.1.3. Certaines délibérations du Congrès auront le caractère de loi du pays et de ce fait ne pourront être contestées que devant le Conseil constitutionnel avant leur publication, sur saisine du représentant de l'Etat, de l'Exécutif de la Nouvelle-Calédonie, d'un président de province, du président du Congrès ou d'un tiers des membres du Congrès.

2.1.4. a) Le Sénat coutumier sera obligatoirement saisi des projets de loi du pays et de délibération lorsqu'ils concerneront l'identité kanak au sens du présent document. Lorsque le texte qui lui sera soumis aura le caractère de loi du pays et concernera l'identité kanak, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie devra à nouveau délibérer si le vote du Sénat coutumier n'est pas conforme. Le vote du Congrès s'imposera alors.

b) Un conseil économique et social représentera les principales institutions économiques et sociales de la Nouvelle-Calédonie. Il sera obligatoirement consulté sur les délibérations à caractère économique et social du Congrès. Il comprendra des représentants du Sénat coutumier.

2.1.5. Les limites des provinces et des communes devraient coïncider, de manière qu'une commune n'appartienne qu'à une province.

2.2. Le corps électoral et le mode de scrutin

2.2.1. Le corps électoral

Le corps électoral pour les consultations relatives à l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie intervenant à l'issue du délai d'application du présent accord (point 5) comprendra exclusivement : les électeurs inscrits sur les listes électorales aux dates des consultations électorales prévues au 5 et qui ont été admis à

participer au scrutin prévu à l'article 2 de la loi référendaire, ou qui remplissaient les conditions pour y participer, ainsi que ceux qui pourront justifier que les interruptions dans la continuité de leur domicile en Nouvelle-Calédonie étaient dues à des raisons professionnelles ou familiales, ceux qui, de statut coutumier ou nés en Nouvelle-Calédonie, y ont eu le centre de leurs intérêts matériels et moraux et ceux qui ne sont pas nés en Nouvelle-Calédonie mais dont l'un des parents y est né et qui y ont le centre de leurs intérêts matériels et moraux.

Pourront également voter pour ces consultations les jeunes atteignant la majorité électorale, inscrits sur les listes électorales, et qui, s'ils sont nés avant 1988, auront eu leur domicile en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998 ou, s'ils sont nés après 1988, ont eu un de leurs parents qui remplissait ou aurait pu remplir les conditions pour voter au scrutin de la fin de 1998.

Pourront également voter à ces consultations les personnes qui pourront justifier, en 2013, de vingt ans de domicile continu en Nouvelle-Calédonie.

Comme il avait été prévu dans le texte signé des accords de Matignon, le corps électoral aux assemblées des provinces et au Congrès sera restreint : il sera réservé aux électeurs qui remplissaient les conditions pour voter au scrutin de 1998, à ceux qui, inscrits au tableau annexe, rempliront une condition de domicile de dix ans à la date de l'élection, ainsi qu'aux électeurs atteignant l'âge de la majorité pour la première fois après 1998 et qui, soit justifieront de dix ans de domicile en 1998, soit auront eu un parent remplissant les conditions pour être électeur au scrutin de la fin de 1998, soit, ayant eu un parent inscrit sur un tableau annexe justifieront d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection.

La notion de domicile s'entendra au sens de l'article 2 de la loi référendaire. La liste des électeurs admis à participer aux scrutins sera arrêtée avant la fin de l'année précédant le scrutin.

Le corps électoral restreint s'appliquerait aux élections communales si les communes avaient une organisation propre à la Nouvelle-Calédonie.

2.2.2. Pour favoriser l'efficacité du fonctionnement des assemblées locales, en évitant les conséquences d'une dispersion des suffrages, le seuil de 5 % s'appliquera aux inscrits et non aux exprimés.

2.3. L'Exécutif

L'Exécutif de la Nouvelle-Calédonie deviendra un gouvernement collégial, élu par le Congrès, responsable devant lui.

L'Exécutif sera désigné à la proportionnelle par le Congrès, sur proposition par les groupes politiques de listes de candidats, membres ou non du Congrès. L'appartenance au Gouvernement sera incompatible avec la qualité de membre du Congrès ou des assemblées de province. Le membre du Congrès ou de l'assemblée de province élu membre du Gouvernement est remplacé à l'assemblée par le suivant de liste. En cas de cessation de fonctions, il retrouvera son siège.

La composition de l'Exécutif sera fixée par le Congrès.

Le représentant de l'Etat sera informé de l'ordre du jour des réunions du Gouvernement et assistera à ses délibérations. Il recevra les projets de décisions avant leur publication et pourra demander une seconde délibération de l'Exécutif.

2.4. Les communes

Les compétences des communes pourront être élargies en matière d'urbanisme, de développement local, de concessions de distribution d'électricité et de fiscalité locale. Elles pourront bénéficier de transferts domaniaux.

3. Les compétences

Les compétences détenues par l'Etat seront transférées à la Nouvelle-Calédonie dans les conditions suivantes :

- certaines seront transférées dès la mise en oeuvre de la nouvelle organisation politique ;
- d'autres le seront dans des étapes intermédiaires ;
- d'autres seront partagées entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie ;
- les dernières, de caractère régalien, ne pourront être transférées qu'à l'issue de la consultation mentionnée au 5.

Le Congrès, à la majorité qualifiée des trois cinquièmes, pourra demander à modifier l'échéancier prévu des transferts de compétences, à l'exclusion des compétences de caractère régalien. L'Etat participera pendant cette période à la prise en charge financière des compétences transférées. Cette compensation financière sera garantie par la loi constitutionnelle.

3.1. Les compétences nouvelles conférées

à la Nouvelle-Calédonie

3.1.1. Les compétences immédiatement transférées

Le principe du transfert est acquis dès l'installation des institutions issues du présent accord : la mise en place s'effectuera au cours du premier mandat du Congrès :

- le droit à l'emploi : la Nouvelle-Calédonie mettra en place, en liaison avec l'Etat, des mesures destinées à offrir des garanties particulières pour le droit à l'emploi de ses habitants. La réglementation sur l'entrée des personnes non établies en Nouvelle-Calédonie sera confortée.

Pour les professions indépendantes le droit d'établissement pourra être restreint pour les personnes non établies en Nouvelle-Calédonie.

Pour les salariés du secteur privé et pour la fonction publique territoriale, une réglementation locale sera définie pour privilégier l'accès à l'emploi des habitants.

- le droit au travail des ressortissants étrangers ;
- le commerce extérieur, dont la réglementation des importations, et l'autorisation

des investissements étrangers ;

- les communications extérieures en matière de poste et de télécommunications à l'exclusion des communications gouvernementales et de la réglementation des fréquences radioélectriques ;
- la navigation et les dessertes maritimes internationales ;
- les communications extérieures en matière de desserte aérienne lorsqu'elles n'ont pour escale en France que la Nouvelle-Calédonie et dans le respect des engagements internationaux de la France ;
- l'exploration, l'exploitation, la gestion et la conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique ;
- les principes directeurs du droit du travail ;
- les principes directeurs de la formation professionnelle ;
- la médiation pénale coutumière ;
- la définition de peines contraventionnelles pour les infractions aux lois du pays ;
- les règles relatives à l'administration provinciale ;
- les programmes de l'enseignement primaire, la formation des maîtres et le contrôle pédagogique ;
- le domaine public maritime, transféré aux provinces.

3.1.2. Les compétences transférées dans une seconde étape

Dans une étape intermédiaire, au cours des second et troisième mandats du Congrès, les compétences suivantes seront transférées à la Nouvelle-Calédonie :

- les règles concernant l'état civil, dans le cadre des lois existantes ;
- les règles de police et de sécurité en matière de circulation aérienne et maritime intérieure ;
- l'élaboration des règles et la mise en oeuvre des mesures intéressant la sécurité civile.

Toutefois, un dispositif permettra au représentant de l'Etat de prendre les mesures nécessaires en cas de carence ;

- le régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;
- le droit civil et le droit commercial ;
- les principes directeurs de la propriété foncière et des droits réels ;
- la législation relative à l'enfance délinquante et à l'enfance en danger ;
- les règles relatives à l'administration communale ;
- le contrôle administratif des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;
- l'enseignement du second degré ;
- les règles applicables aux maîtres de l'enseignement privé sous contrat.

3.2. Les compétences partagées

3.2.1. Les relations internationales et régionales

Les relations internationales sont de la compétence de l'Etat. Celui-ci prendra en compte les intérêts propres de la Nouvelle-Calédonie dans les négociations internationales conduites par la France et l'associera à ces discussions.

La Nouvelle-Calédonie pourra être membre de certaines organisations internationales ou associée à elles, en fonction de leurs statuts (organisations internationales du Pacifique, ONU, UNESCO, OIT, etc.). Le cheminement vers l'émancipation sera porté à la connaissance de l'ONU.

La Nouvelle-Calédonie pourra avoir des représentations dans des pays de la zone Pacifique et auprès de ces organisations et de l'Union européenne.

Elle pourra conclure des accords avec ces pays dans ses domaines de compétence.

Elle sera associée à la renégociation de la décision d'association Europe-PTOM.

Une formation sera mise en place pour préparer des néo-calédoniens à l'exercice de responsabilités dans le domaine des relations internationales.

Les relations de la Nouvelle-Calédonie avec le territoire des îles Wallis-et-Futuna seront précisées par un accord particulier. L'organisation des services de l'Etat sera distincte pour la Nouvelle-Calédonie et ce territoire.

3.2.2. Les étrangers

L'Exécutif de la Nouvelle-Calédonie sera associé à la mise en oeuvre de la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers.

3.2.3. L'audiovisuel

L'Exécutif est consulté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel avant toute décision propre à la Nouvelle-Calédonie.

Une convention pourra être conclue entre le CSA et la Nouvelle-Calédonie pour associer celle-ci à la politique de communication audiovisuelle.

3.2.4. Le maintien de l'ordre

L'Exécutif sera informé par le représentant de l'Etat des mesures prises.

3.2.5. La réglementation minière

Les compétences réservées à l'Etat pour les hydrocarbures, les sels de potasse, le nickel, le chrome et le cobalt seront transférées.

La responsabilité de l'élaboration des règles sera conférée à la Nouvelle-Calédonie, celle de la mise en oeuvre aux provinces.

Un conseil des mines, composé de représentants des provinces et auquel assiste le représentant de l'Etat, sera consulté sur les projets de délibérations du Congrès ou des provinces en matière minière. Si son avis n'est pas conforme ou si le représentant de l'Etat exprime un avis défavorable, l'Exécutif de la Nouvelle-Calédonie se prononcera.

3.2.6. Les dessertes aériennes internationales

L'Exécutif sera associé aux négociations lorsque la compétence n'est pas

entièrement confiée à la Nouvelle-Calédonie.

3.2.7. L'enseignement supérieur et la recherche scientifique

L'Etat associera l'Exécutif à la préparation des contrats qui le lient aux organismes de recherche implantés en Nouvelle-Calédonie et à l'université, afin de permettre une meilleure prise en compte des besoins spécifiques de la Nouvelle-Calédonie en matière de formation supérieure et de recherche. La Nouvelle-Calédonie pourra conclure des conventions d'objectifs et d'orientation avec ces institutions.

3.3. Les compétences régaliennes

La justice, l'ordre public, la défense et la monnaie (ainsi que le crédit et les changes), et les affaires étrangères (sous réserve des dispositions du 3.2.1) resteront de la compétence de l'Etat jusqu'à la nouvelle organisation politique résultant de la consultation des populations intéressées prévue au 5.

Pendant cette période, des néo-calédoniens seront formés et associés à l'exercice de responsabilités dans ces domaines, dans un souci de rééquilibrage et de préparation de cette nouvelle étape.

4. Le développement économique et social

4.1. La formation des hommes

4.1.1. Les formations devront, dans leur contenu et leur méthode, mieux prendre en compte les réalités locales, l'environnement régional et les impératifs de rééquilibrage. Des discussions s'engageront pour la reconnaissance mutuelle des diplômes et des formations avec les Etats du Pacifique. Le nouveau partage des compétences devra permettre aux habitants de la Nouvelle-Calédonie d'occuper davantage les emplois de formateur.

L'université devra répondre aux besoins de formation et de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie.

L'Institut de formation des personnels administratifs sera rattaché à la Nouvelle-Calédonie.

4.1.2. Un programme de formation de cadres moyens et supérieurs, notamment techniques et financiers, sera soutenu par l'Etat à travers les contrats de développement pour accompagner les transferts de compétences réalisés et à venir.

Un programme spécifique, qui prendra la suite du programme « 400 cadres » et concernera les enseignements secondaire, supérieur et professionnel, tendra à la poursuite du rééquilibrage et à l'accession des kanak aux responsabilités dans tous les secteurs d'activités.

4.2. Le développement économique

4.2.1. Des contrats de développement pluriannuels seront conclus avec l'Etat. Ils

pourront concerner la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes et tendront à accroître l'autonomie et la diversification économiques.

4.2.2. Les mines

Un schéma de mise en valeur des richesses minières du territoire sera élaboré. Sa mise en oeuvre sera contrôlée par la Nouvelle-Calédonie grâce au transfert progressif de l'élaboration et de l'application du droit minier.

4.2.3. La politique énergétique contribuera à l'objectif d'autonomie et de rééquilibrage : recherche de sites hydroélectriques, programmation de l'électrification rurale tenant compte des coûts différenciés liés à la géographie du Territoire. Les opérateurs du secteur seront associés à la mise en oeuvre de cette politique.

4.2.4. Le financement de l'économie devra être modernisé :

L'Exécutif sera consulté sur les décisions de politique monétaire.

La Nouvelle-Calédonie sera représentée dans les instances compétentes de l'Institut d'émission.

Pour financer le développement, l'Institut calédonien de participation sera maintenu dans son rôle et ses attributions. Il sera créé un fonds de garantie pour faciliter le financement des projets de développement sur les terres coutumières.

Des objectifs d'intérêt public en faveur du développement seront fixés pour la banque calédonienne d'investissement. Les collectivités, dans la limite de leurs compétences, pourront soutenir le développement des entreprises en collaboration avec le secteur bancaire.

Un dispositif spécifique sera mis en place pour faciliter la restructuration et le redressement des entreprises.

4.3. La politique sociale

4.3.1. L'effort en faveur du logement social sera poursuivi avec le concours de l'Etat. L'attribution des financements et les choix des opérateurs devront contribuer à un équilibre géographique. Une distinction sera effectuée entre les rôles de collecteur, de promoteur et de gestionnaire du parc social.

4.3.2. Une couverture sociale généralisée sera mise en place.

4.4. Le contrôle des outils de développement

La Nouvelle-Calédonie sera mise à même, au cours de la nouvelle période qui s'ouvre, de disposer d'une maîtrise suffisante des principaux outils de son développement. Lorsque l'Etat détient directement ou indirectement la maîtrise totale ou partielle de ces outils, la Nouvelle-Calédonie le remplacera selon des modalités et des calendriers à déterminer. Lorsque la Nouvelle-Calédonie le souhaitera, les établissements publics nationaux intervenant seulement en Nouvelle-Calédonie deviendront des établissements publics de la

Nouvelle-Calédonie.

Sont notamment concernés : Office des postes et télécommunications, Institut de formation des personnels administratifs, Société néo-calédonienne de l'énergie ENERCAL, Institut calédonien de participation, Agence de développement rural et d'aménagement foncier, Agence de développement de la culture kanak...

Lorsque les organismes n'interviennent pas seulement en Nouvelle-Calédonie, celle-ci devra disposer des moyens de faire valoir ses orientations stratégiques en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie par une participation dans le capital ou les instances dirigeantes.

5. L'évolution de l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie

Au cours du quatrième mandat (de cinq ans) du Congrès, une consultation électorale sera organisée. La date de cette consultation sera déterminée par le Congrès, au cours de ce mandat, à la majorité qualifiée des trois cinquièmes.

Si le Congrès n'a pas fixé cette date avant la fin de l'avant-dernière année de ce quatrième mandat, la consultation sera organisée, à une date fixée par l'Etat, dans la dernière année du mandat.

La consultation portera sur le transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, l'accès à un statut international de pleine responsabilité et l'organisation de la citoyenneté en nationalité.

Si la réponse des électeurs à ces propositions est négative, le tiers des membres du Congrès pourra provoquer l'organisation d'une nouvelle consultation qui interviendra dans la deuxième année suivant la première consultation. Si la réponse est à nouveau négative, une nouvelle consultation pourra être organisée selon la même procédure et dans les mêmes délais. Si la réponse est encore négative, les partenaires politiques se réuniront pour examiner la situation ainsi créée.

Tant que les consultations n'auront pas abouti à la nouvelle organisation politique proposée, l'organisation politique mise en place par l'accord de 1998 restera en vigueur, à son dernier stade d'évolution, sans possibilité de retour en arrière, cette « irréversibilité » étant constitutionnellement garantie.

Le résultat de cette consultation s'appliquera globalement pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Une partie de la Nouvelle-Calédonie ne pourra accéder seule à la pleine souveraineté ou conserver seule des liens différents avec la France, au motif que les résultats de la consultation électorale y auraient été différents du résultat global.

L'Etat reconnaît la vocation de la Nouvelle-Calédonie à bénéficier, à la fin de cette période, d'une complète émancipation.

6. Application de l'accord

6.1. Textes

Le Gouvernement engagera la préparation des textes nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord, et notamment du projet de loi de révision constitutionnelle en vue de son adoption au Parlement. Si cette révision ne pouvait être menée à bien et si les modifications constitutionnelles nécessaires à la mise en application des dispositions de l'accord ne pouvaient être prises, les partenaires se réuniraient pour en examiner les conséquences sur l'équilibre général du présent accord.

6.2. Consultations

Des consultations seront organisées en Nouvelle-Calédonie auprès des organisations politiques, coutumières, économiques et sociales sur l'accord conclu, à l'initiative des signataires.

6.3. Scrutin de 1998

Un scrutin sera organisé avant la fin de l'année 1998 sur l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie, objet du présent accord.

La loi constitutionnelle pour la Nouvelle-Calédonie permettra que ne se prononcent que les électeurs admis à participer au scrutin prévu à l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988.

6.4. Elections aux assemblées de province et au Congrès

Des élections aux assemblées de province et au Congrès auront lieu dans les six mois suivant l'adoption des textes relatifs à l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie.

Les mandats des membres des assemblées de province prendront fin à la date de ces élections.

6.5. Comité des signataires

Un comité des signataires sera mis en place pour :

- prendre en compte les avis qui seront formulés par les organismes locaux consultés sur l'accord ;
- participer à la préparation des textes nécessaires pour la mise en oeuvre de l'accord ;
- veiller au suivi de l'application de l'accord.

Les documents ci-dessus, préambule et document d'orientation, ont recueilli l'approbation des partenaires des accords de Matignon, traduisant la fin de la négociation, qui s'est déroulée en présence de M. Dominique Bur, délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République.

A Nouméa, le mardi 5 mai 1998.

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Pour le FLNKS :

Roch Wamytan

Paul Neaoutyine

Charles Pidjot

Victor Tutugoro

Pour le RPCR :

Jacques Lafleur

Pierre Frogier

Simon Loueckhote

Harold Martin

Jean Leques

Bernard Deladriere



Lampiran 2: Curriculum Vitae**Curriculum Vitae**

Nama : Alawiyah

NIM : 165110307111008

Program Studi : S1 Bahasa dan Sastra Prancis

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 26 Juni 1998

Alamat Asal : Jalan Ancol Selatan No. 16, Jakarta Utara – 14350

E-mail : alawiyahasyd@gmail.com

Nomor Ponsel : +6282128565300

Pendidikan : SDS Ayah Bunda (2004-2010)
SMPN 22 Jakarta (2010-2013)
SMAN 80 Jakarta (2013-2016)

Pengalaman Organisasi :

- 2018 - 2019 : Staf Human Resource and Developing Quality
Departemen Outgoing Global Talent AIESEC LCUB

Pengalaman Kepanitiaan :

- 2017 : Local Volunteer Global Guardian Summer Project 2017
- 2018 : Organizing Committee Program and Communication Enlighten
The Future Winter Project 2018
- 2018 : Koordinator Humas Bon Courage!! 11

Lampiran 3: Berita Acara Bimbingan Skripsi












**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
JURUSAN BAHASA DAN SASTRA**

Jalan Veteran Malang 65145, Indonesia Telp. (0341) 575875 Fax. (0341) 575822
E-mail : fib_ub@ub.ac.id <http://www.fib.ub.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama : Alawiyah
2. NIM : 165110307111008
3. Program studi : Bahasa dan Sastra Prancis
4. Topik Skripsi : Sejarah
5. Judul Skripsi : Kajian Historis Implementasi Nouméa Accord di Kaledonia Baru
6. Tanggal Mengajukan : 3 September 2019
7. Tanggal Selesai Revisi : 23 Desember 2019
8. Nama Pembimbing : Rosana Hariyanti, M. A.
9. Keterangan Konsultasi :

No.	Tanggal	Materi	Pembimbing	Paraf
1.	03 September 2019	Pengajuan Judul	Rosana Hariyanti, M. A.	<i>R.</i>
2.	20 September 2019	Pengajuan Bab I	Rosana Hariyanti, M. A.	<i>R.</i>
3.	23 September 2019	Revisi Bab I	Rosana Hariyanti, M. A.	<i>R.</i>
4.	30 September 2019	Pengajuan Bab II	Rosana Hariyanti, M. A.	<i>R.</i>
5.	07 Oktober 2019	Revisi Bab II dan Pengajuan Bab III	Rosana Hariyanti, M. A.	<i>R.</i>
6.	08 Oktober 2019	Revisi Bab III	Rosana Hariyanti, M. A.	<i>R.</i>

7.	09 Oktober 2019	Persetujuan Seminar Proposal	Rosana Hariyanti, M. A.	
8.	11 Oktober 2019	Seminar Proposal	Rosana Hariyanti, M. A.	
9.	21 Oktober 2019	Revisi Seminar Proposal dan Pengajuan Bab IV	Rosana Hariyanti, M. A.	
10.	28 Oktober 2019	Konsultasi Bab IV	Rosana Hariyanti, M. A.	
11.	13 November 2019	Konsultasi Bab IV	Rosana Hariyanti, M. A.	
12.	20 November 2019	Revisi Bab IV dan Pengajuan Bab V	Rosana Hariyanti, M. A.	
13.	28 November 2019	Persetujuan Seminar Hasil	Rosana Hariyanti, M. A.	
14.	05 Desember 2019	Seminar Hasil	Rosana Hariyanti, M. A.	
15.	17 Desember 2019	Revisi Seminar Hasil dan Persetujuan Ujian Skripsi	Rosana Hariyanti, M. A.	
16.	20 Desember 2019	Ujian Skripsi	Rosana Hariyanti, M. A.	
17.	23 Desember 2019	Revisi Akhir Ujian Skripsi	Rosana Hariyanti, M. A.	

10. Telah dievaluasi dan diuji dengan nilai :

A

Malang, 23 Desember 2019

Mengetahui.

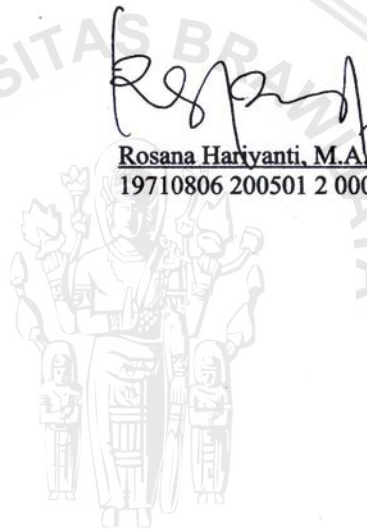
Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra

Dosen Pembimbing



Sahiduddin, Ph.D.

NIP. 19790116 200912 1 001



Rosana Hariyanti, M.A.

19710806 200501 2 000